



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi hak dasar masyarakat Kabupaten Bandung Barat, pemerintahan daerah wajib memberikan pelayanan dasar yang berpedoman pada standar pelayanan minimal yang adil dan transparan;
- b. bahwa untuk mempermudah pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu disusun rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Tim Penerapan SPM adalah Tim Penerapan SPM Kabupaten Bandung Barat.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Urusan SPM adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.
9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
10. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pemerintah Daerah Tahun 2025-2030 yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian target pemenuhan SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2025 sampai dengan 2030.

Pasal 2

- 1) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan, penganggaran, penanganan isu dan permasalahan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pengawasan, sinkronisasi dan koordinasi dalam pemenuhan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

- 2) Urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. urusan pendidikan;
 - b. urusan kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum dan tata ruang;
 - d. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. urusan ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - f. urusan sosial.

BAB II

PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM.
- (2) Rencana aksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi Daerah SPM yang memuat:
 - a. Bab I : memuat mengenai pendahuluan;
 - b. Bab II : memuat mengenai kondisi umum wilayah;
 - c. Bab III : memuat mengenai analisis kondisi pemenuhan SPM pada pelayanan dasar dan permasalahan yang dihadapi;
 - d. Bab IV : memuat mengenai kebijakan nasional pencapaian SPM;
 - e. Bab V : memuat mengenai rencana aksi daerah pencapaian SPM; dan
 - f. Bab VI : memuat mengenai mekanisme, monitoring, evaluasi dan pelaporan SPM.
- (3) Uraian Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 tahun.

- (3) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan SPM.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bagian tata pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah yang membidangi Urusan SPM.
- (2) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. konsultasi.
- (4) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (5) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh bagian tata pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan SPM.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 15 April 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 15 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT TAHUN 2025-2030

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM ini.

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan warganyabaik itu kebutuhan dasar maupun hak sipil sebagai warga negara. Hal ini diamanatkan pula dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dibentuknya pemerintah di negara ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia harus berupaya sedemikian rupa sehingga kebutuhan dasar warganya dapat dipenuhi secara optimal.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan, kebijakan, inovasi bahkan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga. Bahkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diamanatkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan tetap berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa prioritas negara bukan lagi hanya kinerja Pemerintah saja, tetapi terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal telah diatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, Penerima Pelayanan Dasar, Penerapan dan Pelaporan SPM, Pembinaan dan Pengawasan SPM, dan ketentuan lain diantaranya yakni kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar agar pelayanan dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan. Hal ini secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yang bahkan mengamanatkan bahwa dokumen rencana dimaksud harus dimuat dalam RPJMD dan RKPD.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan dimaksud dan sebagai bentuk komitmen dalam penerapan SPM, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023-2027 sebagai pedoman bagi setiap perangkat daerah pengampu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam melaksanakan program, penganggaran, pengawasan dan evaluasi kegiatan agar sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Melalui rencana aksi ini.

2 Landasan Hukum

Dasar hukum kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah adalah sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 15 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;

3 Maksud, dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai pedoman dan acuan dalam penerapan SPM di Daerah Kabupaten Bandung Barat khususnya dalam hal perencanaan dan penganggaran, penanganan isu dan permasalahan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta sinkronisasi dan koordinasi dalam penerapan SPM di Kabupaten Bandung Barat.

Adapun tujuan Rencana Aksi Penerapan SPM ini adalah untuk mewujudkan penerapan SPM Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan target yang ditetapkan. Sedangkan sasaran Rencana Aksi Penerapan SPM ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik terutama dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan meliputi wilayah Administrasi Daerah. Lingkup kegiatan Penyusunan RAD Penerapan SPM Daerah meliputi :

- 1 Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada enam urusan wajib;
- 2 Identifikasi program dan kegiatan serta besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM;
- 3 Melakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja SPM pada enam urusan wajib;
- 4 Melakukan evaluasi dan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM;
- 5 Merumuskan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bandung Barat dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan;
- 6 Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternative dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM;

B. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1. Visi Kabupaten Bandung Barat 2025-2030

Visi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2025-2029 adalah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana yang disampaikan pada saat proses pemilihan kepala daerah sebelumnya. Visi ini akan menggambarkan arah dan juga kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat 2025-2030 juga harus berkesesuaian dan tantangan pembangunan ke depan. Setidaknya ada 4 (empat) isu strategis yang sudah dirumuskan sebelumnya yang akan menjadi fokus dalam penanganan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu isu terkait Pembangunan SDM, Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Sosial dan Pembangunan Lingkungan. Isu Strategis ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menuju Indonesia Emas.

Dengan memperhatikan pemikiran diatas, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat 2025-2030 dirumuskan sebagai berikut:

“Bandung Barat yang AMANAH (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis) berbasis pada Pembangunan SDM, Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Sosial, dan Pembangunan Lingkungan”

Bandung Barat yang hendak diwujudkan merupakan sebuah kondisi Bandung Barat yang Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif dan Harmonis dengan pengertian sebagai berikut:

A. AGAMIS

Pemerintah Bandung Barat yang agamis membawa nilai-nilai religius menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Agamis juga berarti mengedepankan prinsip-prinsip agama dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi yang berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat, tidak hanya sejahtera secara material, tetapi juga memiliki akhlak dan karakter yang baik.

B. MAJU

Terwujudnya kondisi masyarakat Bandung Barat yang unggul, mandiri dan sejahtera melalui pembangunan berbasis potensi lokal guna mendongkrak kesejahteraan seluruh masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mengejar ketertinggalan pembangunan Bandung Barat di kawasan Bandung Raya.

C. ADAPTIF

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merupakan Pemerintahan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. dalam mewujudkan birokrasi yang dinamis dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan merespons perubahan secara cepat, mengurangi prosedur yang berbelit, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

D. NYAMAN

Pembangunan di Bandung Barat dengan segala potensi Sumber Daya Alamnya diarahkan dalam rangka mempercepat dan pemerataan Pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta kondisi geografis yang rawan terhadap bencana serta tidak merusak lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat

E. ASPIRATIF

Potensi penduduk Bandung Barat sebagai modal dasar pembangunan diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pondasi yang kuat bagi generasi mendatang dengan memperhatikan nilai inklusif bagi seluruh masyarakat.

F. HARMONIS

Masyarakat Bandung Barat dapat hidup aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras berlandaskan kearifan budaya lokal serta membangun kondisi harmonis antara pemerintah daerah dengan masyarakat

2. Misi Kabupaten Bandung Barat 2025-2030

Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2025-2030 diarahkan untuk memanfaatkan seluruh potensi daerah yang ada, dengan fokus untuk Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat Bandung Barat yang berakhlak, cerdas dan sehat didasari nilai-nilai religius dengan melibatkan serta penguatan Peran Perempuan dan Pemuda dalam pembangunan, mewujudkan pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berdaya saing dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

Dalam mewujudkan visi pembangunan diatas, maka misi pembangunan Bandung Barat 2025-2030 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang berakhlak dan berkarakter

Untuk mewujudkan masyarakat Bandung Barat yang berakhlak, cerdas dan sehat didasari nilai-nilai religius dengan melibatkan serta penguatan Peran Perempuan dan Pemuda dalam pembangunan

2. Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis potensi sektor unggulan daerah

Mewujudkan pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berdaya saing dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel

Mewujudkan sistem birokrasi yang lebih sederhana dan mudah diakses, serta digitalisasi layanan publik untuk mempercepat proses perizinan, administrasi kependudukan, dan layanan kesehatan serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah serta pengadaan barang dan jasa, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan pengawasan yang ketat guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi.

4. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas Wilayah

Pemerataan infrastruktur dan konektivitas di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

5. Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan wilayah yang tangguh terhadap bencana.

6. Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras untuk mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang harmonis serta penguatan pembangunan desa berbasis kearifan budaya lokal

C. KONDISI UMUM WILAYAH

1 Kondisi Geografi

Kabupaten Bandung Barat terletak diantara $107^{\circ} 1,10'$ BT sampai dengan $107^{\circ} 4,40'$ BT dan $06^{\circ} 3,73'$ LS sampai dengan $07^{\circ} 1,031'$ LS, dengan luas sebesar $1.305,77 \text{ km}^2$ atau 130.577 Ha , dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang dan Kota Cimahi, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

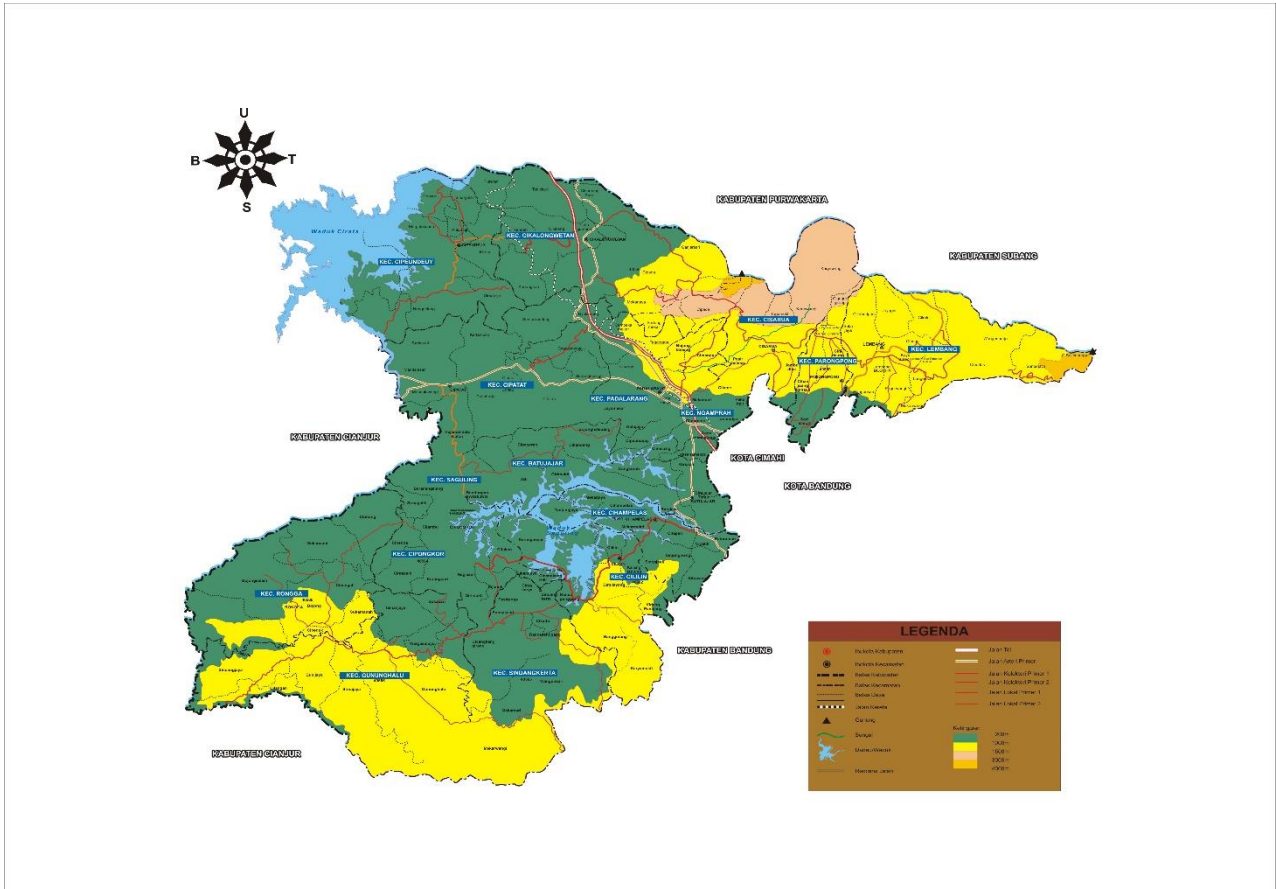
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kedudukan Kabupaten Bandung Barat pada lingkup nasional berada pada kawasan andalan yakni, kawasan andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan adalah industri, tanaman pangan, pariwisata, dan perkebunan. Selain itu, Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung yang berpusat di Kota Bandung dan merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang dikembangkan di Kota Padalarang, Lembang, dan Cililin.

Kabupaten Bandung Barat dalam lingkup Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang termasuk ke dalam PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan pusat Kota Bandung, serta kawasan perkotaan di dalam wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang, yang berbatasan dengan Kota Bandung.

GAMBAR 1.1

PETA ADMINISTRATIF KABUPATEN BANDUNG BARAT

Di dalam rencana pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten



Bandung Barat termasuk ke dalam wilayah pengembangan Cekungan Bandung dan sekitarnya. Wilayah pengembangan Cekungan Bandung meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Wilayah pengembangan Cekungan Bandung merupakan kawasan yang berkembang pesat yang memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang terutama di kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air.

Kegiatan ekonomi di wilayah pengembangan Cekungan Bandung diarahkan pada kegiatan yang mampu mengendalikan pencemaran air, udara dan sampah. Dalam hal ini kegiatan ekonomi utama difokuskan pada perdagangan dan jasa sebagai kegiatan unggulan untuk kawasan perkotaan.

Selain itu pengembangan Wilayah Cekungan Bandung diarahkan sebagai pusat pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan pertanian hortikultura, industri, perdagangan dan jasa, pariwisata, perkebunan, serta perdagangan dan jasa.

Zone agroklimat di Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam zone agroklimat B1, B2, dan B3. Zone agroklimat B1, B2 dan B3 mempunyai bulan-bulan basah selama 7 sampai 9 bulan berturut-turut dan bulan kering kurang dari 2 bulan (Zone B1) atau bulan kering antara 2 – 3 bulan (Zone B2) atau bulan kering lebih dari 3 bulan (Zone B3). Berdasarkan kondisi bulan-bulan basah tersebut, maka pada wilayah yang mempunyai zone agroklimat B1, B2 dan B3, peruntukannya bagi sawah tadah hujan bisa dilakukan selama 2 kali tanam dalam setahun.

Curah hujan rata-rata tahunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat < 1500–3500 mm/tahun. Wilayah-wilayah yang mempunyai curah hujan kurang dari 1500 mm/tahun adalah wilayah dataran yaitu sebagian Kecamatan Batujajar dan Padalarang. Wilayah-wilayah yang mempunyai curah hujan 1500-2000 mm/tahun adalah sebagian Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Ngamprah,

Padalarang dan Parongpong. Wilayah- wilayah yang mempunyai curah hujan 2000-2500 mm/tahun adalah sebagian Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah, Cipatat, Cipongkor dan Sindangkerta.

Wilayah- wilayah yang mempunyai curah hujan 2500-3000 mm/tahun sebagian Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Cipatat, Rongga, Gununghalu dan Sindangkerta. Curah hujan tertinggi terjadi di daerah pegunungan di bagian utara Kabupaten Bandung Barat (3000- 3500 mm/tahun) terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Cikalong Wetan dan Cipeundeuy.

Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal (>40%). Kecamatan Gununghalu merupakan kecamatan yang mempunyai kemiringan lereng sangat terjal terluas (13.480 Ha). Adapun kemiringan lereng datar (0-8%) merupakan kemiringan lereng dengan luas dominan kedua. Kecamatan Batujajar adalah kecamatan dengan luas lereng datar (0-8%) terluas (4.899 Ha). Kemiringan lereng 8-15% cenderung untuk berada di beberapa kecamatan saja.

Ketinggian wilayah di Kabupaten Bandung Barat secara umum berkisar antara 110 – 2000 m dpl. Persentase ketinggian terbesar adalah 500 - 1000 m dpl, yaitu seluas 59.614,15 ha atau sebesar 46,68% dari luas Kabupaten Bandung Barat, sedangkan ketinggian terkecil yaitu 1500 - 2000 m dpl dengan luas 10.480,39 ha atau sebesar 8,10% dari luas Kab. Bandung Barat. Berdasarkan kemiringan lereng dan beda tinggi serta kenampakan di lapangan morfologi Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan morfologi, yaitu morfologi pedataran,landai, perbukitan dan morfologi pegunungan.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat antara lain: aluvial coklat kelabu; aluvial kelabu dan merah; andosol coklat; andosol coklat dan regosol coklat; glei humus dan aluvial; glei humus dan aluvial kelabu; latosol coklat; latosol merah dan coklat; latosol merah kekuningan; latosol tua kemerahan; regosol kelabu dan litosol. Jenis tanah yang paling luas di Kabupaten Bandung Barat adalah glei humus dan alluvial sekitar 28.938,40 Ha atau 23,84%, sedangkan yang luasnya paling kecil adalah jenis tanah alluvial kelabu dan merah sekitar 612,64 Ha atau 0,50 % dari luas Kabupaten Bandung Barat.

Penggunaan lahan merupakan suatu cara atau metode bagaimana pemanfaatan ruang di suatu wilayah yang akan digunakan berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang tersedia. Penggunaan lahan di suatu wilayah dapat dibagi menurut fungsi dan jenisnya.

Penggunaan lahan menurut fungsinya di wilayah Kabupaten Bandung Barat saat ini dapat dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu: kawasan terbangun (perumahan dan perkampungan, jasa perdagangan, jalan, dan industri) dan kawasan non terbangun (sawah teknis dan sawah non teknis, tegalan atau ladang, kebun, hutan, penggunaan tanah khusus dan lainnya: sungai, jalan). Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bandung, yang mana dalam struktur wilayah pengembangan Jawa Barat berfungsi sebagai hinterland dari kabupaten Bandung. Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat sangat sederhana, hal ini ditunjukkan dari penggunaan lahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
 PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING KABUPATEN BANDUNG BARAT (DALAM Ha)

No	JENIS GUNA LAHAN		TOTAL LUAS (Ha)	PERSENTASE (%)
A	KAWASAN LINDUNG			
	1	Kawasan Lindung		
		Hutan	2422.884577	
		Hutan Rimba	14011.11738	
B	KAWASAN BUDIDAYA			
	1	Kawasan Budidaya Pertanian		
	a	Perkebunan	25111.7138	
	b	Sawah	21166.21533	
	c	Sawah Tadah Hujan	50.63877766	
	d	Tegal/Ladang	26357.83493	
	2	Budidaya Non Pertanian		
	a	Industri	83.4170356	
	b	Pasar/pertokoan	4.609691338	
	c	Perumahan	20537.57251	
	d	Lapangan	12.8659142	
No	JENIS GUNA LAHAN		TOTAL LUAS (Ha)	PERSENTASE (%)
	e	Taman	4.626944875	
	f	Tambang	419.1868935	
C	LAINNYA			
	a	Tanah Kosong	664.358025	
	b	Rumput	12.065315	
	c	Rawa	8.202513572	
	d	Semak belukar	10999.14338	
	f	Vegetasi non budidaya lainnya	51.01042418	
	g	Waduk	6599.124122	

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat 2009-2019, Bappelitbangda 2024

Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu: berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi luas 19.171,04 Ha sedangkan kawasan budidaya pertanian 78.446,15 Ha atau 59,96% dan kawasan budidaya non pertanian 25.811,82 Ha atau 12,30% dan lainnya 7.392,23 Ha atau 3,50%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kawasan budidaya masih merupakan areal yang terluas dibandingkan dengan kawasan hutan.

Sumberdaya air merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Keterbatasan air merupakan potensi konflik apabila tidak ada usaha dari semua pihak terkait untuk melestarikan dan mengatur pemakaiannya, baik untuk keperluan industri, perumahan maupun jasa lainnya. Beberapa sumber air di Kabupaten Bandung Barat yang perlu dilestarikan dan dipelihara fungsinya, antara lain: Sungai Citarum dan anak sungainya, Danau atau Situ (Ciburuy, Lembang dan Situ Umar) Waduk atau reservoir (Saguling dan Cirata). Terjadinya alih fungsi lahan untuk pemukiman dan industri jasa lainnya menyebabkan terjadinya kekurangan pasokan air baik yang berasal dari air tanah maupun air permukaan.

Dalam aspek Hidrogeologi, berdasarkan studi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, sumber air bawah tanah di Wilayah Kabupaten Bandung Barat dibagi ke dalam beberapa zona:

- a. Zona kritis untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m³ perbulan. Penyebaran zona kritis pengambilan air tanah di Kabupaten Bandung Barat berada di Kecamatan Batujajar.
- b. Zona rawan untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit maksimum 100 m³ per bulan. Zona rawan untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan Batujajar. Daerah resapan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan Lembang dan Cisarua. Daerah aman pengambilan air tanah, pengambilan baru diperbolehkan dengan debit 170 m³ per hari dengan sumur terbatas.
- c. Daerah aman untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan Cikalong wetan, Padalarang, Ngamprah, dan Parongpong.
- d. Daerah resapan, tidak dikembangkan bagi peruntukan kecuali untuk air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m³ per bulan. Daerah resapan ini meliputi Kecamatan Lembang dan Cisarua.
- e. Zona bukan cekungan air tanah, produktivitas akuifer rendah sehingga kurang layak dikembangkan, kecuali akuifer dangkal di daerah lembah untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 m³ per bulan per sumur. Zona bukan cekungan air tanah penyebarannya di Kecamatan Cipeundeuy, Cipatat, Cipongkor, Cililin, Sindangkerta, Gununghalu, dan Rongga.

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian tanah aktual menunjukkan bahwa tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung Barat dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Sangat sesuai untuk Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB) mencapai luas sekitar 18.410,03 Ha (14,09%) dan Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) mencapai luas sekitar 26.957,26 Ha (20,63%) dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bandung Barat.
- b. Sangat sesuai untuk Tanaman Tahunan (TT) mencapai luas sekitar 39.571,24 Ha (30,30%) dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- c. Tidak sesuai untuk Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB), Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) dan Tanaman Tahunan (TT), yang pada saat ini merupakan Tanaman Tahunan berupa hutan yang berfungsi sebagai konservasi mencapai luas sekitar 39.243,75 Ha (30,05%) dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Dalam hal kekayaan sumber daya alam, khususnya bahan galian non logam dan batuan, wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi yang cukup banyak seperti batu andesit, pasir, batu kapur, dan lain sebagainya yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan, khusus bahan galian kapur, sebagian besar terdapat di wilayah Kecamatan Padalarang dan Cipatat atau sering pula disebut Kawasan Karst Citatah.

2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 sebanyak 1.911.661 jiwa dengan komposisi (menurut jenis kelamin) relatif seimbang, yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 974.016 jiwa (50,9 persen) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 937.645 jiwa (49,1 persen). Dibandingkan dengan tahun 2023 (1.834.256 Jiwa), jumlah penduduk pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 77.405 jiwa atau mengalami laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 1,37%.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Lembang	106,178	102,906	209,084
2	Parongpong	59,746	57,921	117,667
3	Cisarua	43,128	41,523	84,651
4	Cikalongwetan	69,342	66,602	135,944
5	Cipendeuy	47,560	45,714	93,274
6	Ngamprah	93,200	90,518	183,718
7	Cipatat	77,610	74,390	152,000
8	Padalarang	98,060	95,054	193,114
9	Batujajar	59,278	57,600	116,878
10	Cihampelas	75,239	71,862	147,101
11	Cililin	53,083	50,620	103,703
12	Cipongkor	55,642	53,013	108,655
13	Rongga	33,138	31,453	64,591
14	Sindangkerta	40,644	39,274	79,918
15	Gununghalu	43,015	40,685	83,700
16	Saguling	19,153	18,510	37,663
JUMLAH		974,016	937,645	1,911,661

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester II (Dua) Tahun 2024

D. DAERAH RAWAN BENCANA

Untuk mengidentifikasi kapasitas wilayah dalam menghadapi bencana, salah satu indikator yang digunakan adalah tingkat indeks jasa ekosistem dalam mencegah dan melindungi dari bencana. Jasa ekosistem ini berfungsi sebagai infrastruktur alami yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, mencakup dua jenis utama: Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir serta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana.

Di Kabupaten Bandung Barat, Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir didominasi oleh kategori tinggi hingga sangat tinggi, yang mencakup sekitar 50% dari total wilayah. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- Kategori Sangat Tinggi mencakup 35.107 Ha atau 27% dari wilayah, terutama di Kecamatan Cipatat, serta sebagian di Kecamatan Cihampelas, Cikalongwetan, dan Cipeundeuy.
- Kategori Tinggi mencakup 29.904 Ha atau 23%, dengan sebaran utama di Kecamatan Gununghalu, serta sebagian di Kecamatan Cisarua, Cipongkor, dan Cipeundeuy.
- Kategori Sedang meliputi 40.292 Ha atau 31%, terutama di Kecamatan Rongga, Gununghalu, Saguling, dan Cihampelas.
- Kategori Rendah hanya mencakup 2.342 Ha atau 2%, tersebar secara sporadis di beberapa kecamatan.
- Kategori Sangat Rendah meliputi 23.551 Ha atau 18%, terutama di Kecamatan Cipatat, Gununghalu, dan Lembang. Wilayah dengan kategori sangat rendah memiliki risiko tinggi terhadap gangguan aliran air dan banjir, sehingga perlu perencanaan tata ruang yang baik untuk mengurangi dampaknya.

BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat 2022-2024 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.1.1. BIDANG PENDIDIKAN

TABEL 2.1.1. Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Daerah Tahun 2024

Kabupaten	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan			Pagu Anggaran (SPM)	Realisasi Anggaran SPM
	Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
BANDUNG BARAT	1000	1000	100%	17000	17000	100%	1000	1000	100%	Rp. 1,140,949,329,896	

2.1.2. BIDANG KESEHATAN

TABEL 2.1.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Daerah Tahun 2024

KABUPATEN	Pelayanan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan pada Bayi baru lahir			Pelayanan Kesehatan pada Balita			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	
	33162	29415	88.70 %	33011	29035	87.96 %	31442	28791	91.57 %	154401	142724	92.44 %	256406	243258	94.87 %	
BANDUNG BARAT	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	
	1075087	1006840	93.65 %	203828	180074	88.35 %	108906	93286	85.66 %	15911	15911	100%	2639	2290	86.78 %	
	Pelayanan Kesehatan pada Orang terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Penderita Penyakit Menular Seksual (PMS) dan Penyakit Menular Lainnya			Pagu Anggaran SPM		Realisasi Anggaran SPM							
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Rp. 5,098,503,580		Rp.4,942,256,125							
43543	35380	81.25 %	36408	24161	66.36 %											

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

2.1.3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

TABEL 2.1.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tahun 2024

Kabupaten	SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM							PAGU ANGGARAN SPM	REALISASI ANGGARAN SPM
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengelohan Air Limbah Domestik					
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)			
BANDUNG BARAT	31615	31615	100%	4680	4680	100%	Rp.25,808,679,944	Rp.25,808,679,944	

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2024

2.1.4. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Tabel 2.2.4. Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

Kabupaten	SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT							
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah			Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah			PAGU ANGGARAN SPM	REALISASI ANGGARAN SPM
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Rp. 1,297,618,400	Rp.965,999,080
BANDUNG BARAT	65	65	100%	0	0	0%		

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat

2.1.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.1.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

KABUPATEN	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
KABUPATEN EN	1834256	1834256	100%	254660	254660	100%	254660	254660	100%	16653	16639	99,92%	1834256	1834256	100%
BANDUNG BARAT	Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM													
	Rp. 13,350,049,650	Rp.12,936,789,878													

2.1.6. Bidang Sosial

Tabel 2.1.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

SPM Bidang Sosial															
KABUPAT EN	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Usia Lanjut Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
BANDUNG BARAT	354	354	100%	40	40	100%	1256	1256	100%	16	16	100%	300	300	100%
	Pagu Anggaran SPM		Realisasi Anggaran SPM												
	Rp. 1,322,651,300		Rp. 1,195,083,240												

Sumber Data : Dinas Sosial Tahun 2024

2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Daerah ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib Pelayanan Dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan data yang tidak terintegrasi antar Bidang.
- 2) Keterbatasan sistem informasi yang menyebabkan data sulit diakses dan dianalisis.
- 3) Ketidakakuratan dalam perhitungan kebutuhan sumber daya seperti tenaga pengajar, sarana prasarana, dan anggaran.
- 4) Data yang tidak mencerminkan kebutuhan sebenarnya di lapangan.
- 5) Penganggaran yang tidak mencakup semua aspek yang diperlukan dalam peningkatan mutu pendidikan.
- 6) Perencanaan yang tidak berbasis pada kebutuhan nyata dan data yang valid.
- 7) Pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan rencana karena kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan.
- 8) Kurangnya evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.

2.2.2. Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Target terlalu tinggi sehingga petugas dan kader di lapangan kesulitan mencari sasaran
- 2) Perlu adanya penyesuaian untuk pemeriksaan K1 USG dan K6 USG karena USG baru terdistribusi pada tahun 2024
- 3) Belum terpenuhinya BMHP untuk skrining lansia sesuai sasaran
- 4) Adanya ketidaksesuaian antara estimasi sasaran dan data riil, data estimasi lebih besar dibandingkan dengan sasaran riilnya, sehingga capaian tidak sesuai dengan target
- 5) Jumlah logistik (catridge, pot dahak, tuberkulin) tidak mencukupi
- 6) Penggunaan logistik reagen HIV masih rendah, cakupan orang beresiko terinfeksi HIV dites HIV masih rendah
- 7) Perencanaan dan penganggaran dari sumber APBD dan DAK
- 8) Dalam pemenuhan kebutuhan prasarana (sdidtk kit, KPSP, Buku KIA) masih kurang di prioritaskan
- 9) Tidak terakomodirnya pengajuan kebutuhan logistik dan kegiatan yang sudah direncanakan
- 10) Dukungan anggaran program HIV masih rendah
- 11) Masih banyak ibu balita yang tidak membawa anaknya ke fasilitas kesehatan (puskesmas, posyandu) untuk memeriksakan pertumbuhan dan perkembangannya

- 12) Skrining yang sudah dilaksanakan untuk menjaring suspek TBC terkadang terhambat karena faskes TCM overload dan sampel tertunda pemeriksaannya
- 13) Belum semua Faskes mampu tes HIV dan Pengobatan (Test and Treatment)
- 14) Mengikuti Permenkes tentang SPM terbaru ada kesenjangan antara ekspektasi dan reality terutama skrining keswa masih rendah
- 15) Dari 32 Puskesmas, sudah terbentuk 24 Posyandu remaja namun sasaran diluar sekolah tidak terdata karena memang sarasannya tidak berkunjung ke Posyandu remaja.
- 16) Tidak adanya Tenaga LSM Penjangkau lapangan untuk sasaran populasi kunci Wanita Penjaja Seks (WPS) dan Pengguna Jarum Suntik. Stigma tentang HIV masih tinggi di masyarakat menghambat pelayanan kesehatan bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV maupun bagi ODHIV

2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum terlaksananya secara maksimal proses pengumpulan pendataan, proses evaluasi dan pembinaan dalam penerapan SPM;
- 2) Penetapan sasaran belum berdasarkan data rill (by name by address) tetapi masih menggunakan estimasi sehingga sulit untuk melakukan perhitungan kebutuhan;
- 3) Perencanaan Kesiapan Lahan terkadang tidak sepenuhnya terverifikasi
- 4) Kurangnya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data;
- 5) Pemerintah Daerah belum memiliki Sistem Pengelolaan Air Limbah secara Terpusat (SPALD-T)
- 6) Perlu adanya penyesuaian Rencana Anggaran yang bersumber dari RPJMD hingga rencana kerja dan juga perlu adanya Rencana Aksi Daerah untuk memudahkan penyesuaian anggaran dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditentukan oleh Kementerian/Lembaga Pusat;
- 7) Harus ada penyelarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat dengan Kemampuan Anggaran Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik karena sudah indicator-indikator pendukung yang sudah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait;

2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum terlaksananya proses pengumpulan dan pendataan secara maksimal;
- 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Perumahan Rakyat ;
- 3) Masih dalam tahapan pendataan guna memperoleh data BNBA dan masih kesulitan cara perhitungan penerapan SPM dikaitkan dengan anggaran;
- 4) Beberapa indikator Mutu Layanan Dasar, belum bisa dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun 2024;

- 5) Proses Penghitungan Kebutuhan berdasarkan Laporan kejadian dari Desa dan BPBD , sehingga untuk total kebutuhan akan di hitung secara berkala. untuk sementara data kejadian yang telah kami terima yaitu data kejadian bencana tahun 2024;
- 6) untuk relokasi sifatnya masih dalam tahap survei dan pengumpulan data-data. Jadi belum adanya DED untuk kebutuhan relokasi bencana;
- 7) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik
- 8) perencanaan maupun pengawasan.

2.2.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Penyelenggaraan bidang ketenteraman

Penyelenggaraan bidang secara Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Penyelenggaraan bidang ketenteraman umum masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya SDM untuk melakukan survey lapangan dalam menentukan sasaran dari Penegakan Perda di Daerah ;
- 2) Belum optimalnya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan;
- 3) Belum adanya survey dalam Penegakan Peraturan Daerah;
- 4) Kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mempengaruhi terhadap kinerja Perangkat Daerah;
- 5) Kajian Resiko Bencana (Krb) Masih Menggunakan Periode 2017-2021, Dan Akan Diperbaharui Di T.A 2025
- 6) Perhitungan Kebutuhan SPM di Setiap Bidang terkadang muncul kebutuhan yang mendadak diluar perhitungan sebelumnya
- 7) Adanya Anggaran sebesar Rp 676,322,700 bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang mendukung kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP
- 8) Dengan Luasnya Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 165 Desa. Dalam Pelaksanaan Kegiatan di Bidang SPM urusan Gakda dan Trantibumlinmas hanya dilakukan di sebagian wilayah hal ini akibat kekurangan SDM dan Sarana Prasarana serta terbatasnya anggaran yang ada
- 9) Belum adanya Prioritas Penerapan SPM pada Bidang Penyelamatan Kebakaran sehingga anggaran yang digunakan tidak maksimal;
- 10) Belum adanya pembentukan tim reaksi cepat multisektor dan pembentukan cluster logistik peningkatan sarpras (Gudang)

2.2.6. Bidang Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik tetapi masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan Data DTKS tidak memunculkan per-jenis PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
- 2) Belum Adanya Sekretariat Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial)
- 3) Sebaran Anggaran pagu belum sesuai dengan Renja dan Renstra
- 4) Adanya evaluasi anggaran dari Gubernur yang mengakibatkan efisiensi anggaran (rasionalisasi)
- 5) Setiap adanya Bantuan dari Kemensos berupa barang bukan anggaran, sehingga mengalami kesulitan dalam besaran anggaran tersebut.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam upaya pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menerbitkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

3.1. Strategi Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Nomenklatur Kodefikasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub. Kegiatan Jenis Layanan SPM Bidang Urusan Pendidikan sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pengelolaan Pendidikan	a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0001	0	0	0%	
			2) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0003				
			3) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0004				
			4) Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0005				
			5) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0006				
			6) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0007				
			7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0009				
			8) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00010				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			9) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00011				
			10) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00013				
			11) Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00014				
			12) Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00015				
			13) Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00016				
			14) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00017				
			15) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00021				
			16) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00022				
			17) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00025				
			18) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00026				
			19) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00027				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			20) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00028				
			21) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00029				
			22) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.000030				
			23) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00031				
			24) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00032				
			25) Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00033				
			26) Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00034				
			27) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00035				
			28) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00036				
			29) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00037				
			30) Koordinasi,Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00038				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			31) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00039				
			32) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00041				
			33) Penyediaan infrastruktur TIK		1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00042				
			34) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intolerans		1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00043				
			35) Penataan Ruang/Sudut Baca		1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00044				
			36) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00045				
			37) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00046				
			38) Pembangunann Ruang Kelas Baru		1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00047				
			39) Rehabilitas Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00048				
			40) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang		1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00049				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			41) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00050				
			42) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.00051				
		b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0001				
			2) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0003				
			3) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0004				
			4) Pembangunan Perpustakaan Sekolah		1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0005				
			5) Pembangunan Laboratorium		1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0006				
			6) Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0007				
			7) Pembangunan Asrama Sekolah		1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0008				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			8) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0009				
			9) Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0010				
			10)Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0011				
			11)Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0012				
			12)Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0014				
			13)Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0016				
			14)Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0017				
			15)Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0018				
			16)Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0019				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			17) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0021				
			18) Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0022				
			19) Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0023				
			20) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0024				
			21) Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0025				
			22) Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0026				
			23) Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0027				
			24) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0030				
			25) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0032				
			26) Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0034				
			27) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0035				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			28) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0038				
			29) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039				
			30) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040				
			31) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041				
			32) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0042				
			33) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0043				
			34) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0044				
			35) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0045				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			36) Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0046				
			37) Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0047				
			38) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0048				
			39) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049				
			40) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050				
			41) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0051				
			42) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0052				
			43) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			44) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055				
			45) Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0056				
			46) Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0057				
			47) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058				
			48) Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0059				
			49) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060				
			50) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061				
			51) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0062				
			52) Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0063				
			53) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0064				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		c) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0002				
			2) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0003				
			3) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0004				
			4) Pengadaan Mebel PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0007				
			5) Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0008				
			6) Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0009				
			7) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta Didik	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0011				
			8) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0012				
			9) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta Didik	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0013				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0015				
			11) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0016				
			12) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0017				
			13) Pengelolaan Dana BOP PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0018				
			14) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0019				
			15) Pemeliharaan Mebel Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0020				
			16) Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peserta Didik	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0021				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			17) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0022				
			18) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0023				
			19) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0024				
			20) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0025				
			21) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0026				
			22) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0028				
			23) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0029				
			24) Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0030				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			25) Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0031				
			26) Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0032				
			27) Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0033				
			28) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta Didik	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0034				
			29) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0035				
			30) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0036				
			31) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0037				
			32) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0038				
			33) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0039				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			34) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0040				
			35) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0041				
			36) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0042				
		d) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0001				
			2) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Peserta Didik	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0010				
			3) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0011				
			4) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0012				
			5) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0015				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0016				
			7) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0017				
			8) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0018				
			9) Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0021				
			10) Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0023				
			11) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0024				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			12) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0025			
			13) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0026			
			14) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0027			
			15) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0028			
			16) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0030			
			17) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0024			
			18) Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0032			
			19) Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0033			
			20) Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0034			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			21) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta Didik	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0035			
			22) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0036			
			23) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0037			
			24) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0038			
			25) Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0039			
			26) Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0040			
			27) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0041			
			28) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0042			
			29) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0043			
			30) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0044			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			31) Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0045			
			32) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta Didik	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0046			
			33) Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0047			
			34) Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0048			
			35) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0049			
			36) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0050			

3.1.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Nomenklatur Kodefikasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Jenis Layanan SPM Bidang Urusan Kesehatan sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	1) Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.04.0001			
			2) Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.04.0002			
			3) Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.04.0003			
			4) Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.04.0004			
			5) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.04.0005			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.04.0006			
			7) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.04.0007			
			8) Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.04.0008			
			9) Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.04.0009			
			10) Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.04.0010			
			11) Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.04.0011			
			12) Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.04.0012			

3.1.3. SPM PELAYANAN DASAR URUSAN PEKERJAAN UMUM

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten	1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0001			
			2) Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0002			
			3) Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0003			
			4) Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0004			
			5) Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0005			
			6) Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0006			
			7) Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0007			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			8) Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0008			
			9) Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0009			
			10) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0010			
			11) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0011			
			12) Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0012			
			13) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0013			
			14) Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0014			
			15) Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0015			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persen tase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			16) Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0008			
			17) Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0009			
			18) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0010			
			19) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0011			
			20) Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0012			
			21) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0013			
			22) Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0014			
			23) Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0015			

			24) Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0016			
			25) Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0017			
			26) Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0018			
			27) Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0019			
			28) Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0020			
			29) Perbaiki SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0021			
			30) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0022			
			31) Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM	Lembaga	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0023			
			32) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0024			
			33) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Dokumen	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0025			

			Penyediaan Air Minum (SPAM)							
			34) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0026			
			35) Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0027			
			36) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0028			
			37) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0029			
			38) Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0030			
			39) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0031			
			40) Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0032			
			41) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0033			

2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten	1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten	Dokumen	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0002			
			2) Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0003			
			3) Rehabilitasi/peningkatan /perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0004			
			4) Rehabilitasi/peningkatan /perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0005			
			5) Pembangunan/ penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0006			
			6) Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0007			
			7) Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0008			

			8) Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0009			
			9) Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0010			
			10) Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0011			
			11) Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0012			
			12) Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0013			
			13) Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0014			
			14) Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0015			
			15) Rehabilitasi/peningkatan /perluasan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0016			
			16) Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan /perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0017			

			17) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0018			
			18) Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0019			
			19) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat		1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0020			
			20) Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0021			
			21) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0022			
			22) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat		1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0023			
			23) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan		1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0024			

			24) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan		1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0025			
			25) Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0026			
			26) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0027			
			27) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0028			
			28) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0029			
			29) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0030			
			30) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0031			

			31) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Permukiman (SPALD) Skala	M ³ /Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0032			
			32) Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0033			
			33) Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0034			
			34) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0035			
			35) Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0036			
			36) Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0037			
			37) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0038			
			38) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0039			
			39) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.03.2.01.0040			

3.1.4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Nomenklatur Kodefikasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Jenis Layanan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengembangan Perumahan	a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	1) Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.001			
			2) Identifikasi lahan lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.002			
			3) Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.003			
			4) Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.004			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			5) Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0005			
			6) Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0006			
			7) Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0007			
			8) Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0008			
			9) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0009			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
			4	5	6	7	8	9	10	11
		b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0001			
			2) Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0002			
			3) Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0003			
			4) Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0004			
			5) Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0005			

			6) Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0006			
			7) Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten	Rumah Tangga	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.030007			
			8) Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/	Rumah Tangga	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0008			
			9) Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten	Rumah Tangga	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0009			
			10) Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0010			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			11) Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0011			
			12) Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0012			

3.1.5. SPM URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Nomenklatur Kodefikasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Jenis Layanan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	1) Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0003			
			2) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0004			
			3) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0005			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentas
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			4) Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0006			
			5) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0007			
			6) Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0008			
			7) Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0009			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			8) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0010			
			9) Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Unit	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0011			
			10) Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0012			
			11) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0013			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			12) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0014			
			13) Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0015			
			14) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0015			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			15) Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0016			
			16) Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusakan massa	Kasus	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0016			
			17) Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0017			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	1. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0001			
			2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0002			
			3. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0003			
			4. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0004			
			5. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0005			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0006			
			7. Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0007			
			8. Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0008			
			9. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0009			
			10. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0010			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			11. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0011			
			12. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0012			
		c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten	1. Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	1.05.03	1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0002			
			2. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	1.05.03	1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0003			
			3. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	1.05.03	1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0004			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	1.05.03	1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0005			
			5. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	1.05.03	1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0006			
2	Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)	a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	1. Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.01	1.05.03.2.01.0003			
			2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten (per jenis bencana)	orang	1.05.03	1.05.03.2.01	1.05.03.2.01.0004			
		b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten	Laporan	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0001			
			2. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten	orang	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0002			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten	Dokumen	1.05.03	1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0003			
			4. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	1.05.03	1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0004			
			5. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	1.05.03	1.05.03.2.01	1.05.03.2.01.0005			
			6. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	1.05.03	1.05.03.2.01	1.05.03.2.01.0006			
			7. Penanganan pasca bencana Kabupaten		1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0007			
			8. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten	Orang	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0008			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			9. Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	1.05.03	1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0009			
			10. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	1.05.03	1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0010			
			11. Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.01	1.05.03.2.01.0011			
			12. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	1.05.03	1.05.03.2.01	1.05.03.2.01.0012			
			13. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten	Kegiatan	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0013			
			14. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0014			
			15. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten	Unit	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0015			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			16. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	Kawasan	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0016			
			17. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten	Laporan	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0017			
		c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	1.05.03	1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0001			
			2. Respon cepat darurat bencana Kabupaten	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0002			
			3. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten	Orang	1.05.03	1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0003			
			4. Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0007			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten	orang	1.05.03	1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0008			
			6. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten	orang	1.05.03	1.05.03.2.03	1.05.03.2.02.0009			
			7. Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0010			
			8. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	1.05.03	1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0011			
		d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1. Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0001			
			2. Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0002			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0003			
			4. Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0004			
			5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0005			
			6. Penanganan pasca bencana Kabupaten	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0006			
			7. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten	Orang	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0007			
			8. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten	Orang	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0008			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			9. Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0009			
			10. Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0010			
			11. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten	Lembaga	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0011			
			12. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kabupaten	Laporan	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0012			
			13. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0013			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Program Pencegahan, Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	1. Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0001			
			2. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0002			
			3. Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0003			
			4. Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0004			
			5. Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0005			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0007			
			7. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0008			
			8. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0011			
			9. Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0012			
			10. Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Unit	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0013			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			11. Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0014			
			12. Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0015			
			13. Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0016			
			14. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Laporan	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0017			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			15. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0018			
			16. Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0019			
		b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1. Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.02	1.05.04.2.02.0001			
			2. Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	1.05.04	1.05.04.2.02	1.05.04.2.02.0002			
		c. Investigasi Kejadian Kebakaran	1. Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran		1.05.04	1.05.04.2.03	1.05.04.2.03.0001			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	1.05.04	1.05.04.2.03	1.05.04.2.03.0001			
			2. Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	1.05.04	1.05.04.2.03	1.05.04.2.03.0002			
			3. Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.03	1.05.04.2.03.0003			
		e. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia		1.05.04	1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0001			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	1.05.04	1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0002			
			3. Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0003			
			4. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	1.05.04	1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0004			

3.1.6. SPM URUSAN SOSIAL

Nomenklatur Kodifikasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Jenis Layanan SPM Bidang Urusan Sosial

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Rehabilitasi Sosial	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Penyediaan permakanaan	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.1.01.0001			
			2. Penyediaan sandang	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.1.01.0002			
			3. Penyediaan alat bantu	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.1.01.0003			
			4. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.1.01.0004			
			5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.1.01.0005			
			6. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.1.01.0006			
			7. Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.1.01.0007			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kodefikasi			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			8. Pemberian layanan kedaruratan	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.1.01.0008			
			9. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.1.01.0009			
			10. Pemberian layanan rujukan	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.1.01.0010			
		b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten	1. Penyediaan makanan	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0001			
			2. Penyediaan sandang	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0002			
			3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0003			
			4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0004			
			5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0005			

3.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Rencana Aksi Daerah Bidang Pendidikan Tahun 205-2030

Tahun 2025-2026

URUSAN : PENDIDIKAN

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
1)	Pendidikan Anak Usia Dini		34.110 Peserta Didik	34.110 Peserta Didik	100%	Rp.7.337.570.000	APBD	2026	34.451 Peserta Didik	34.451 Peserta Didik	100%	Rp.8.071.327.000	
1	Angka partisipasi sekolah	2025	100	100	100%	Rp.1923.700.000	APBD	2026	100	100	100%	Rp.2.116.070.000	APBD
2	Angka partisipasi murni	2025	64,47	64,47	100%	Rp.650.000.000	APBD	2026	64,52	64,52	100%	Rp.715.000.000	APBD
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	2025	48,61	48,61	100%	Rp.1.638.870.000	APBD	2026	52,60	52,60	100%	Rp.1.802.757.000	APBD
4	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	2025	54,18	54,18	100%	Rp.150.000.000	APBD	2026	54,45	54,45	100%	Rp.165.000.000	APBD
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	2025	-	-		Rp.150.000.000	APBD	2026	0,00	0,00		Rp.165.000.000	APBD
6	Kecukupan formasi guru ASN	2025	-	-		Rp.150.000.000	APBD	2026	0,00	0,00		Rp.165.000.000	APBD
7	Indeks distribusi guru	2025	-	-		Rp.150.000.000	APBD	2026	0,00	0,00		Rp.165.000.000	APBD
8	Proporsi PTK bersertifikat	2025	29,51	29,51	100%	Rp.150.000.000	APBD	2026	29,47	29,47	100%	Rp.165.000.000	APBD
9	Proporsi PTK penggerak	2025	-	-		Rp.150.000.000	APBD	2026	0,00	0,00		Rp.165.000.000	APBD
10	Pengalaman pelatihan guru	2025	-	-		Rp.150.000.000	APBD	2026	0,00	0,00		Rp.165.000.000	APBD

Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM
Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Bandung Barat 2024 – 2030

Tahun 2025-2026
 URUSAN : PENDIDIKAN

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
1)	Pendidikan Anak Usia Dini		34.110 Peserta Didik	34.110 Peserta Didik	100%	Rp.7.337.570.000	APBD	2026	34.451 Peserta Didik	34.451 Peserta Didik	100%	Rp.8.071.327.000	
1	Angka partisipasi sekolah	2025	100	100	100%	Rp.1923.700.000	APBD	2026	100	100	100%	Rp.2.116.070.000	APBD
2	Angka partisipasi murni	2025	64,47	64,47	100%	Rp.650.000.000	APBD	2026	64,52	64,52	100%	Rp.715.000.000	APBD
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	2025	48,61	48,61	100%	Rp.1.638.870.000	APBD	2026	52,60	52,60	100%	Rp.1.802.757.000	APBD
4	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	2025	54,18	54,18	100%	Rp.150.000.000	APBD	2026	54,45	54,45	100%	Rp.165.000.000	APBD
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	2025	-	-		Rp.150.000.000	APBD	2026	0,00	0,00		Rp.165.000.000	APBD
6	Kecukupan formasi guru ASN	2025	-	-		Rp.150.000.000	APBD	2026	0,00	0,00		Rp.165.000.000	APBD
7	Indeks distribusi guru	2025	-	-		Rp.150.000.000	APBD	2026	0,00	0,00		Rp.165.000.000	APBD
8	Proporsi PTK bersertifikat	2025	29,51	29,51	100%	Rp.150.000.000	APBD	2026	29,47	29,47	100%	Rp.165.000.000	APBD
9	Proporsi PTK penggerak	2025	-	-		Rp.150.000.000	APBD	2026	0,00	0,00		Rp.165.000.000	APBD
10	Pengalaman pelatihan guru	2025	-	-		Rp.150.000.000	APBD	2026	0,00	0,00		Rp.165.000.000	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
2)	Pendidikan Dasar (SD)		159.684 Peserta Didik	159.684 Peserta Didik	100%	Rp.33.567.625.200			165.205 Peserta Didik	165.205 Peserta Didik	100%	Rp. 36.924.387.720	
1	Angka partisipasi kasar	2025	97,48	97,48	100%	Rp.500.000.000	APBD	2026	97,51	97,51	100%	Rp 550.000.000	APBD
2	Angka partisipasi sekolah	2025	100	100	100%	Rp.13.777.825.200	APBD	2026	100	100	100%	Rp 15.155.607.720	APBD
3	Angka partisipasi murni	2025	91,57	91,57	100%	Rp.357.145.200	APBD	2026	91,61	91,61	100%	Rp 392.859.720	APBD
4	Kemampuan literasi	2025	76,70	76,70	100%	Rp.500.000.000	APBD	2026	76,80	76,80	100%	Rp 550.000.000	APBD
5	Kemampuan numerasi	2025	68,35	68,35	100%	Rp.100.000.000	APBD	2026	68,64	68,64	100%	Rp 110.000.000	APBD
6	Perbedaan Skor Literasi	2025	61,93	61,93	100%	Rp.100.000.000	APBD	2026	63,00	63,00	100%	Rp 110.000.000	APBD
7	Perbedaan Skor numerasi	2025	50,92	50,92	100%	Rp.5.000.000.000	APBD	2026	53,15	53,15	100%	Rp 5.500.000.000	APBD
8	Indeks iklim keamanan	2025	77,36	77,36	100%	Rp.539.800.000	APBD	2026	78,13	78,13	100%	Rp 593.780.000	APBD
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	2025	76,74 dan 63,97	76,74 dan 63,97	100%	Rp.539.800.000	APBD	2026	77,50 dan 64,60	77,50 dan 64,60	100%	Rp 593.780.000	APBD
10	Kecukupan formasi guru ASN	2025	10,98	10,98	100%	Rp.500.000.000	APBD	2026	12,60	12,60	100%	Rp 550.000.000	APBD
11	Indeks distribusi guru	2025	0,39	0,39	100%	Rp.500.000.000	APBD	2026	0,41	0,41	100%	Rp 550.000.000	APBD
12	Proporsi PTK bersertifikat	2025	38,34	38,34	100%	Rp.500.000.000	APBD	2026	40,21	40,21	100%	Rp 550.000.000	APBD
13	Proporsi PTK penggerak	2025	12,57	12,57	100%	Rp.500.000.000	APBD	2026	15,08	15,08	100%	Rp 550.000.000	APBD
14	Pengalaman pelatihan guru	2025	2,03	2,03	100%	Rp. 500.000.000	APBD	2026	2,44	2,44	100%	Rp 550.000.000	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)							Pencapaian SPM N+1 (2026)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
3)	Pendidikan Dasar (SMP)		72.189 Peserta Didik	72.189 Peserta Didik	100%	Rp.23.735.180.000			71.355 Peserta Didik	71.355 Peserta Didik	100%	Rp.26.108.698.000	
1	Angka partisipasi kasar	2025	102,24	102,24	100%	Rp.1.180.000.000	APBD	2026	102,25	102,25	100%	Rp.1.298.000.000	APBD
2	Angka partisipasi sekolah	2025	100	100	100%	Rp. 11.083.600.000	APBD	2026	100	100	100%	Rp.12.191.960.000	APBD
3	Angka partisipasi murni	2025	81,32	81,32	100%	Rp.400.000.000	APBD	2026	81,34	81,34	100%	Rp.440.000.000	APBD
4	Kemampuan literasi	2025	72,43	72,43	100%	Rp.100.000.000	APBD	2026	72,46	72,46	100%	Rp.110.000.000	APBD
5	Kemampuan numerasi	2025	67,45	67,45	100%	Rp.100.000.000	APBD	2026	67,53	67,53	100%	Rp.110.000.000	APBD
6	Perbedaan skor literasi	2025	72,49	72,49	100%	Rp. 250.000.000	APBD	2026	73,21	73,21	100%	Rp.275.000.000	APBD
7	Perbedaan skor numerasi	2025	67,50	67,50	100%	Rp.2.000.000.000	APBD	2026	68,18	68,18	100%	Rp.2.200.000.000	APBD
8	Indeks iklim keamanan	2025	75,72	75,72	100%	Rp .1.128.830.000	APBD	2026	76,48	76,50	100%	Rp.1.241.713.000	APBD
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	2025	75,82 dan 63,59	75,82 dan 63,59	100%	Rp.100.000.000	APBD	2026	76,57 dan 64,22	76,57 dan 64,22	100%	Rp.110.000.000	APBD
10	Kecukupan formasi guru ASN	2025	1,45	1,45	100%	Rp.770.000.000	APBD	2026	1,57	1,57	100%	Rp.847.000.000	APBD
11	Indeks distribusi guru	2025	0,43	0,43	100%	Rp.770.000.000	APBD	2026	0,45	0,45	100%	Rp.847.000.000	APBD
12	Proporsi PTK bersertifikat	2025	37,05	37,05	100%	Rp.770.000.000	APBD	2026	37,09	37,09	100%	Rp.847.000.000	APBD
13	Proporsi PTK penggerak	2025	12,56	12,56	100%	Rp.770.000.000	APBD	2026	15,07	15,07	100%	Rp.847.000.000	APBD
14	Pengalaman pelatihan guru	2025	3,00	3,00	100%	Rp.770.000.000	APBD	2026	3,60	3,60	100%	Rp .847.000.000	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
4	Pendidikan Kesetaraan		5.729 Peserta Didik	5.729 Peserta Didik	100%	Rp. 2.136.850.000			2.798 Peserta Didik	2.798 Peserta Didik	100%	Rp.2.350.535.000	
1	Angka partisipasi kasar	2025	-				APBD	2026	0				APBD
2	Angka partisipasi sekolah	2025	14,76	14,76	100%	Rp.1.436.850.000	APBD	2026	14,99	14,99	100%	Rp.1.250.535.000	APBD
3	Kemampuan literasi	2025	-				APBD	2026	0				APBD
4	Kemampuan numerasi	2025	-				APBD	2026	0				APBD
5	Perbedaan skor literasi	2025	-				APBD	2026	0				APBD
6	Perbedaan skor numerasi	2025	-				APBD	2026	0				APBD
7	Indeks iklim keamanan	2025	-				APBD	2026	0				APBD
8	Indeks iklim kebhinekaan	2025	-				APBD	2026	0				APBD
9	Indeks iklim inklusivitas	2025	-				APBD	2026	0				APBD
10	Kecukupan formasi guru ASN	2025	-				APBD	2026	0				APBD
11	Indeks distribusi guru	2025	-				APBD	2026	0				APBD
12	Proporsi PTK bersertifikat	2025	-				APBD	2026	0				APBD
13	Proporsi PTK penggerak	2025	-				APBD	2026	0				APBD

TAHUN 2027-2028

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2027)						Pencapaian SPM N+1 (2028)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
1)	Pendidikan Anak Usia Dini		34.796 Peseta Didik	34.796 Peseta Didik	100%	Rp.8.878.459.700			35.144 Peserta Didik	35.144 Peserta Didik	100%	Rp.9.766.305.670	
1	Angka partisipasi sekolah	2027	100	100	100%	Rp.2.327.677.000	APBD	2028	100	100	100%	Rp.2.560.444.700	APBD
2	Angka partisipasi murni	2027	64,57	64,57	100%	Rp.786.500.000	APBD	2028	64,61	64,61	100%	Rp.2.560.444.700	APBD
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	2027	55,93	55,93	100%	Rp.1.983.032.700	APBD	2028	58,71	58,71	100%	Rp.2.181.335.970	APBD
4	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	2027	54,68	54,68	100%	Rp.181.500.000	APBD	2028	54,87	54,87	100%	Rp.199.650.000	APBD
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	2027	0,00	0,00		Rp.181.500.000	APBD	2028	0,00	0,00		Rp.199.650.000	APBD
6	Kecukupan formasi guru ASN	2027	0,00	0,00		Rp.181.500.000	APBD	2028	0,00	0,00		Rp.199.650.000	APBD
7	Indeks distribusi guru	2027	0,00	0,00		Rp.181.500.000	APBD	2028	0,00	0,00		Rp.199.650.000	APBD
8	Proporsi PTK bersertifikat	2027	29,43	29,43	100%	Rp.181.500.000	APBD	2028	29,39	29,39	100%	Rp.199.650.000	APBD
9	Proporsi PTK penggerak	2027	0,00	0,00		Rp.181.500.000	APBD	2028	0,00	0,00		Rp.199.650.000	APBD
10	Pengalaman pelatihan guru	2027	0,00	0,00		Rp.181.500.000	APBD	2028	0,00	0,00		Rp.199.650.000	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2027)							Pencapaian SPM N+1 (2028)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
2)	Pendidikan Dasar (SD)		166.081 Peserta Didik	166.081 Peserta Didik	100%	Rp. 40.616.826.493			166.967 Peserta Didik	166.967 Peserta Didik	100%	Rp.44.678.509.141	
1	Angka partisipasi kasar	2027	97,55	97,55	100%	Rp.605.000.000	APBD	2028	97,62	97,62	100%	Rp.665.500.000	APBD
2	Angka partisipasi sekolah	2027	100	100	100%	Rp.16.671.168.492	APBD	2028	100	100	100%	Rp.18.338.285.341	APBD
3	Angka partisipasi murni	2027	91,68	91,68	100%	Rp.432.145.692	APBD	2028	91,79	91,79	100%	Rp.475.360.261	APBD
4	Kemampuan literasi	2027	76,91	76,91	100%	Rp.605.000.000	APBD	2028	77,02	77,02	100%	Rp.665.500.000	APBD
5	Kemampuan numerasi	2027	68,88	68,88	100%	Rp.121.000.000	APBD	2028	69,09	69,09	100%	Rp.133.100.000	APBD
6	Perbedaan Skor Literasi	2027	63,89	63,89	100%	Rp.121.000.000	APBD	2028	64,63	64,63	100%	Rp.133.100.000	APBD
7	Perbedaan Skor numerasi	2027	55,00	55,00	100%	Rp.6.050.000.000	APBD	2028	56,55	56,55	100%	Rp.6.655.000.000	APBD
8	Indeks iklim keamanan	2027	78,91	78,91	100%	Rp.653.158.000	APBD	2028	79,70	79,70	100%	Rp.718.473.800	APBD
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	2027	78,28 dan 65,25	78,28 dan 65,25	100%	Rp.653.158.000	APBD	2028	79,06 dan 65,90	79,06 dan 65,90	100%	Rp.718.473.800	APBD
10	Kecukupan formasi guru ASN	2027	15,03	15,03	100%	Rp.605.000.000	APBD	2028	19,08	19,08	100%	Rp.665.500.000	APBD
11	Indeks distribusi guru	2027	0,45	0,45	100%	Rp.605.000.000	APBD	2028	0,51	0,51	100%	Rp.665.500.000	APBD
12	Proporsi PTK bersertifikat	2027	43,02	43,02	100%	Rp. 605.000.000	APBD	2028	47,69	47,69	100%	Rp.665.500.000	APBD
13	Proporsi PTK penggerak	2027	18,86	18,86	100%	Rp.605.000.000	APBD	2028	25,14	25,14	100%	Rp.665.500.000	APBD
14	Pengalaman pelatihan guru	2027	3,05	3,05	100%	Rp.605.000.000	APBD	2028	4,07	4,07	100%	Rp.665.500.000	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2027)							Pencapaian SPM N+1 (2028)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
3)	Pendidikan Dasar (SMP)		70.513 Peserta Didik	70.513 Peserta Didik	100%	Rp. 28.719.567.800			69.662 Peserta Didik	69.662 Peserta Didik	100%	Rp.31.591.524.580	
1	Angka partisipasi kasar	2027	102,28	102,28	100%	Rp.1.427.800.000	APBD	2028	102,31	102,31	100%	Rp.1.570.580.000	APBD
2	Angka partisipasi sekolah	2027	100	100	100%	Rp.13.411.156.000	APBD	2028	100	100	100%	Rp.14.752.271.600	APBD
3	Angka partisipasi murni	2027	81,37	81,37	100%	Rp.484.000.000	APBD	2028	81,42	81,42	100%	Rp.532.400.000	APBD
4	Kemampuan literasi	2027	72,51	72,51	100%	Rp.121.000.000	APBD	2028	72,58	72,58	100%	Rp.133.100.000	APBD
5	Kemampuan numerasi	2027	67,64	67,64	100%	Rp.121.000.000	APBD	2028	67,82	67,82	100%	Rp.133.100.000	APBD
6	Perbedaan skor literasi	2027	73,95	73,95	100%	Rp.302.500.000	APBD	2028	74,69	74,69	100%	Rp.332.750.000	APBD
7	Perbedaan skor numerasi	2027	68,86	68,86	100%	Rp.2.420.000.000	APBD	2028	69,55	69,55	100%	Rp.2.662.000.000	APBD
8	Indeks iklim keamanan	2027	77,24	77,26	100%	Rp.1.365.884.300	APBD	2028	78,01	78,03	100%	Rp.1.502.472.730	APBD
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	2027	77,34 dan 64,86	77,34 dan 64,86	100%	Rp.121.000.000	APBD	2028	78,12 dan 65,51	78,12 dan 65,51	100%	Rp.133.100.000	APBD
10	Kecukupan formasi guru ASN	2027	1,76	1,76	100%	Rp.847.000.000	APBD	2028	2,07	2,07	100%	Rp.931.700.000	APBD
11	Indeks distribusi guru	2027	0,48	0,48	100%	Rp.847.000.000	APBD	2028	0,53	0,53	100%	Rp.931.700.000	APBD
12	Proporsi PTK bersertifikat	2027	37,16	37,16	100%	Rp.847.000.000	APBD	2028	37,27	37,27	100%	Rp.931.700.000	APBD
13	Proporsi PTK penggerak	2027	18,84	18,84	100%	Rp.847.000.000	APBD	2028	25,11	25,11	100%	Rp.931.700.000	APBD
14	Pengalaman pelatihan guru	2027	4,50	4,50	100%	Rp.847.000.000	APBD	2028	6,00	6,00	100%	Rp.931.700.000	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2027)						Pencapaian SPM N+1 (2028)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
4	Pendidikan Kesetaraan		2.238 Peserta Didik	2.238 Peserta Didik	100%	Rp.2.585.588.500			1.790 Peserta Didik	1.790 Peserta Didik	100%	Rp.2.844.147.350	
1	Angka partisipasi kasar	2027	0				APBD	2028	0				APBD
2	Angka partisipasi sekolah	2027	15,18	15,18	100%	Rp.1.375.588.500	APBD	2028	15,33	15,33	100%	Rp.1.513.147.350	APBD
3	Kemampuan literasi	2027	0				APBD	2028	0				APBD
4	Kemampuan numerasi	2027	0				APBD	2028	0				APBD
5	Perbedaan skor literasi	2027	0				APBD	2028	0				APBD
6	Perbedaan skor numerasi	2027	0				APBD	2028	0				APBD
7	Indeks iklim keamanan	2027	0				APBD	2028	0				APBD
8	Indeks iklim kebhinekaan	2027	0				APBD	2028	0				APBD
9	Indeks iklim inklusivitas	2027	0				APBD	2028	0				APBD
10	Kecukupan formasi guru ASN	2027	0				APBD	2028	0				APBD
11	Indeks distribusi guru	2027	0				APBD	2028	0				APBD
12	Proporsi PTK bersertifikat	2027	0				APBD	2028	0				APBD
13	Proporsi PTK penggerak	2027	0				APBD	2028	0				APBD

TAHUN 2029-2030

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2029)						Pencapaian SPM (2030)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
1)	Pendidikan Anak Usia Dini		35.495 Peserta Didik	35.495 Peserta Didik	100%	Rp.10.742.936.237			35.850 Peserta Didik	35.850 Peserta Didik	100%	Rp. 11.817.229.861	
1	Angka partisipasi sekolah	2029	100	100	100%	Rp.2.816.489.170	APBD	2030	100	100	100%	Rp. 3.098.138.087	APBD
2	Angka partisipasi murni	2029	64,64	64,64	100%		APBD	2030	64,79	64,79	100%		APBD
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	2029	61,02	61,02	100%	Rp.2.399.469.567	APBD	2030	72,59	72,59	100%	Rp. 2.639.416.524	APBD
4	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	2029	55,03	55,03	100%	Rp.219.615.000	APBD	2030	55,82	55,82	100%	Rp. 241.576.500	APBD
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	2029	0,00	0,00		Rp.219.615.000	APBD	2030	0,00	0,00		Rp.241.576.500	APBD
6	Kecukupan formasi guru ASN	2029	0,00	0,00		Rp.219.615.000	APBD	2030	0,00	0,00		Rp.241.576.500	APBD
7	Indeks distribusi guru	2029	0,00	0,00		Rp.219.615.000	APBD	2030	0,00	0,00		Rp.241.576.500	APBD
8	Proporsi PTK bersertifikat	2029	29,37	29,37	100%	Rp.219.615.000	APBD	2030	30,23	30,23	100%	Rp.241.576.500	APBD
9	Proporsi PTK penggerak	2029	0,00	0,00		Rp.219.615.000	APBD	2030	0,00	0,00		Rp.241.576.500	APBD
10	Pengalaman pelatihan guru	2029	0,00	0,00		Rp.219.615.000	APBD	2030	0,00	0,00		Rp.241.576.500	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2029)							Pencapaian SPM (2030)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
2)	Pendidikan Dasar (SD)		167.861 Peserta Didik	167.861 Peserta Didik	100%	Rp.49.146.360.055			168.764 Peserta Didik	168.764 Peserta Didik	100%	Rp.54.060.996.061	
1	Angka partisipasi kasar	2029	97,76	97,76	100%	Rp.732.050.000	APBD	2030	98,17	98,17	100%	Rp.805.255.000	APBD
2	Angka partisipasi sekolah	2029	100	100	100%	Rp 20.172.113.875	APBD	2030	100	100	100%	Rp. 22.189.325.263	APBD
3	Angka partisipasi murni	2029	92,02	92,02	100%	Rp.522.896.287	APBD	2030	92,69	92,69	100%	Rp.575.185.916	APBD
4	Kemampuan literasi	2029	77,12	77,12	100%	Rp.732.050.000	APBD	2030	77,23	77,23	100%	Rp.805.255.000	APBD
5	Kemampuan numerasi	2029	64,47	64,47	100%	Rp.146.410.000	APBD	2030	70,1	70,1	100%	Rp.161.051.000	APBD
6	Perbedaan Skor Literasi	2029	65,25	65,25	100%	Rp.146.410.000	APBD	2030	68,34	68,34	100%	Rp.161.051.000	APBD
7	Perbedaan Skor numerasi	2029	57,84	57,84	100%	Rp.7.320.500.000	APBD	2030	64,28	64,28	100%	Rp. 8.052.550.000	APBD
8	Indeks iklim keamanan	2029	80,50	80,50	100%	Rp.790.321.180	APBD	2030	81,31	81,31	100%	Rp.869.353.298	APBD
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	2029	79,85 dan 66,56	79,85 dan 66,56	100%	Rp.790.321.180	APBD	2030	80,65 dan 67,23	80,65 dan 67,23	100%	Rp.869.353.298	APBD
10	Kecukupan formasi guru ASN	2029	27,18	27,18	100%	Rp.732.050.000	APBD	2030	51,47	51,47	100%	Rp.805.255.000	APBD
11	Indeks distribusi guru	2029	0,64	0,64	100%	Rp.732.050.000	APBD	2030	1,02	1,02	100%	Rp.805.255.000	APBD
12	Proporsi PTK bersertifikat	2029	57,05	57,05	100%	Rp.732.050.000	APBD	2030	85,12	85,12	100%	Rp.805.255.000	APBD
13	Proporsi PTK penggerak	2029	37,71	37,71	100%	Rp.732.050.000	APBD	2030	75,42	75,42	100%	Rp.805.255.000	APBD
14	Pengalaman pelatihan guru	2029	6,10	6,10	100%	Rp.732.050.000	APBD	2030	12,2	12,2	100%	Rp.805.255.000	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2029)							Pencapaian SPM (2030)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
3)	Pendidikan Dasar (SMP)		68.803 Peserta Didik	68.803 Peserta Didik	100%	Rp. 34.750.677.038			67.935 Peserta Didik	67.935 Peserta Didik	100%	Rp.38.225.744.742	
1	Angka partisipasi kasar	2029	102,38	102,38	100%	Rp 1.727.638.000	APBD	2030	102,59	102,59	100%	Rp.1.900.401.800	APBD
2	Angka partisipasi sekolah	2029	100	100	100%	Rp 16.227.498.760	APBD	2030	100	100	100%	Rp. 17.850.248.636	APBD
3	Angka partisipasi murni	2029	81,51	81,51	100%	Rp 585.640.000	APBD	2030	81,79	81,79	100%	Rp.644.204.000	APBD
4	Kemampuan literasi	2029	72,72	72,72	100%	Rp 146.410.000	APBD	2030	73,15	73,15	100%	Rp.161.051.000	APBD
5	Kemampuan numerasi	2029	68,18	68,18	100%	Rp 146.410.000	APBD	2030	69,27	69,27	100%	Rp.161.051.000	APBD
6	Perbedaan skor literasi	2029	75,43	75,43	100%	Rp 366.025.000	APBD	2030	76,19	76,19	100%	Rp.402.627.500	APBD
7	Perbedaan skor numerasi	2029	70,24	70,24	100%	Rp 2.928.200.000	APBD	2030	70,94	70,94	100%	Rp. 3.221.020.000	APBD
8	Indeks iklim keamanan	2029	78,79	78,82	100%	Rp 1.652.720.003	APBD	2030	79,58	79,58	100%	Rp. 1.817.992.003	APBD
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	2029	72,09 dan 56,02	78,89 dan 66,17	100%	Rp 146.410.000	APBD	2030	79,68 dan 66,83	79,68 dan 66,83	100%	Rp.161.051.000	APBD
10	Kecukupan formasi guru ASN	2029	2,69	2,69	100%	Rp 1.024.870.000	APBD	2030	4,55	4,55	100%	Rp1.127.357.000	APBD
11	Indeks distribusi guru	2029	0,635	0,635	100%	Rp 1.024.870.000	APBD	2030	0,94	0,94	100%	Rp.1.127.357.000	APBD
12	Proporsi PTK bersertifikat	2029	37,495	37,495	100%	Rp 1.024.870.000	APBD	2030	38,17	38,17	100%	Rp.1.127.357.000	APBD
13	Proporsi PTK penggerak	2029	37,67	37,67	100%	Rp 1.024.870.000	APBD	2030	75,34	75,34	100%	Rp.1.127.357.000	APBD
14	Pengalaman pelatihan guru	2029	9	9	100%	Rp 1.024.870.000	APBD	2030	18	18	100%	Rp.1.127.357.000	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2029)						Pencapaian SPM N (2030)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
4	Pendidikan Kesetaraan		1.432 Peserta Didik	1.432 Peserta Didik	100%	Rp.3.128.562.085			1.146 Peserta Didik	1.146 Peserta Didik	100%	Rp.3.441.418.294	
1	Angka partisipasi kasar	2029	15,46	15,46	100%	Rp.1.664.462.085	APBD	2030	16,12	16,12	100%	Rp.1.830.908.294	APBD
2	Angka partisipasi sekolah	2029	0				APBD	2030	0				APBD
3	Kemampuan literasi	2029	0				APBD	2030	0				APBD
4	Kemampuan numerasi	2029	0				APBD	2030	0				APBD
5	Perbedaan skor literasi	2029	0				APBD	2030	0				APBD
6	Perbedaan skor numerasi	2029	0				APBD	2030	0				APBD
7	Indeks iklim keamanan	2029	0				APBD	2030	0				APBD
8	Indeks iklim kebhinnekaan	2029	0				APBD	2030	0				APBD
9	Indeks iklim inklusivitas	2029	0				APBD	2030	0				APBD
10	Kecukupan formasi guru ASN	2029	0				APBD	2030	0				APBD
11	Indeks distribusi guru	2029	0				APBD	2030	0				APBD
12	Proporsi PTK bersertifikat	2029	0				APBD	2030	0				APBD
13	Proporsi PTK penggerak	2029	0				APBD	2030	0				APBD

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH SPM URUSAN KESEHATAN
TAHUN 2025-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT					37.900						41.690		
1)	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2025	37.900		100%		APBD	2026	41.690		100%		APBD
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	2025	37.900		100%	70.873.000	APBN	2026	41.690		100%	74,208,200	APBD
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	2025	6.822.000		100%	1.500.840.000	APBD	2026	7.504.200		100%	1.350.756.000	APBD
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	2025	37.900		100%	1.232.697.500	APBD	2026	41.690		100%	1.355.967.250	APBD
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	2025	37.900		100%	844.412.000	APBD	2026	41.690		100%	929.076.000	APBD
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	2025	37.900		100%	129.219.000	APBD	2026	41.690		100%	141.460.800	APBD
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2025	5.685		100%	28.450.000	APBD	2026	6.254		100%	31.250.000	APBD
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Hepatitis B	2025	5.685		100%	684.000	APBD	2026	41.690		100%	750.000	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima a Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaa n	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisa si	Mutu Layan an	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Sifilis	2025	5.685		100%	62.425.000	APBD	2026	6.254		100%	68.750.000	APBD
9	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : HIV	2025	5.685		100%	227.400.000	APBD	2026	6.254		100%	250.160.000	APBD
10	Kartu ibu/rekam medis ibu	2025	37.900		100%	30.320.000	APBD	2026	41.690		100%	33.360.000	APBD
11	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2025	37.900		100%	1.220.380.000	APBD	2026	41.690		100%	1.342.418.000	APBD
12	Media KIE	2025	70		100%	3.500.000	APBD	2026	105		100%	5.250.000	APBD
13	Gel USG	2025	37.900		100%	164.486.000	APBD	2026	41.690		100%	180.934.600	APBD
14	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	2025	32		100%	-	-	2026	32		100%	-	-
15	Tenaga kesehatan : Perawat	2025	32		100%	-	-	2026	32		100%	-	-
16	Tenaga kesehatan : Bidan	2025	32		100%	-	-	2026	32		100%	-	-
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2025	32		100%	-	APBD	2026	32		100%	-	-
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2025	32		100%	-	APBD	2026	32		100%	-	-
19	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	2025	37.900		100%	-	APBD	2026	41.690	41.690	100%	-	-

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)							Pencapaian SPM N+1 (2026)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2025	39.588		100%		APBD	2026	43.546	43.546	100%		APBD
1	Formulir partograf	2025	39.588		100%	27.711.600	APBD	2026	43.546	43.546	100%	27.769.000	APBD
2	Kartu ibu (rekam medis)	2025	39.588		100%	31.680.000	APBD	2026	43.546	43.546	100%	31.760.000	APBD
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2025	39.588		100%	-	APBD	2026	43.546	43.546	100%	-	APBD
4	Media KIE	2025	32		100%	3.500.000	APBD	2026	32	32	100%	5.250.000	APBD
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	2025	32		100%	-	-	2026	32	32	100%	-	-
6	Tenaga kesehatan : Bidan	2025	32		100%	-	-	2026	32	32	100%	-	-
7	Tenaga kesehatan : Perawat	2025	32		100%	-	-	2026	32	32	100%	-	-
8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2025	32		100%	-	-	2026	32	32	100%	-	-
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2025	32		100%	-	-	2026	32	32	100%	-	-

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2025	41.473		100%		APBD	2026	45.621	45.621	100%		APBD
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	2025	Bayi 0-7 hari (26761)		100%	78.353.280	APBD	2026	Bayi 0-7 hari (29.437)	Bayi 0-7 hari (29.437)	100%	78,353,280	APBD
2	Vitamin K1 injeksi	2025	Bayi 0-7 hari (26761)		100%	20.439.288	APBD	2026	Bayi 0-7 hari (29.437)	Bayi 0-7 hari (29.437)	100%	22.482.453	APBD
3	Salep/tetes mata antibiotik	2025	41.473		100%	414.730.000	APBD	2026	45.621	45.621	100%	456.200.000	APBD
4	Formulir bayi baru lahir	2025	41.473		100%	9.337.500	APBD	2026	45.621	45.621	100%	10.260.000	APBD
5	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2025	41.473		100%	622.095.000	APBD	2026	45.621	45.621	100%	684.315.000	APBD
6	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	2025	32		100%	3.500.000	APBD	2026	32	32	100%	5.250.000	APBD
7	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
8	Tenaga kesehatan : Bidan	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
9	Tenaga kesehatan : Perawat	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
13	Kader Kesehatan	2025	2.343		100%	-	APBD	2026	3	3	100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
4)	Pelayanan Kesehatan Balita	2025	149.905		100%		APBD	2026	164.895		100%		APBD
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	2025	149.905		100%	74.950.000	APBD	2026	164.895		100%	85.550.000	APBD
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	2025	149.905		100%	54.000.000	APBD	2026	164.895		100%	61.740.000	APBD
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	2025	149.905		100%		APBD	2026	164.895		100%		APBD
4	Vitamin A Biru	2025	37.476		100%	350.190.000	APBD	2026	106.720		100%	385.215.000	APBD
5	Vitamin A Merah	2025	112.429		100%	4.705.410.000	APBD	2026	269.731		100%	5.175.945.000	APBD
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	2025	Bayi usia 1-11 bulan (63831)		100%	141.355.536	APBD	2026	Bayi usia 1-11 bulan (70214)		100%	371,853,344	APBD
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	2025	Bayi usia 1-11 bulan (63831)		100%	65.926.770	APBD	2026	Bayi usia 1-11 bulan (70214)		100%	190,771,438	APBD
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	2025	Bayi usia 1-11 bulan (63831)		100%	936.907.482	APBD	2026	Bayi usia 1-11 bulan (70214)		100%	2,711,102,968	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib	2025	Bayi usia 1-11 bulan (63831)		100%	499.121.700	APBD	2026	Bayi usia 1-11 bulan (70214)		100%	1,444,301,980	APBD
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	2025	Bayi usia 1-11 bulan (63831)		100%	452.092.158	APBD	2026	Bayi usia 1-11 bulan (70214)		100%	1,308,227,248	APBD
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	2025	Bayi usia 1-11 bulan (63831)		100%	499.121.700	APBD	2026	Bayi usia 1-11 bulan (70214)		100%	1,444,301,980	APBD
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	2025	Bayi 18-24 bulan (94830)		100%	452.092.158	APBD	2026	Bayi 18-24 bulan (104313)		100%	1,943,559,816	APBD
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	2025	149.905		100%	553.131	APBD	2026	164.895		100%	694.494.900	APBD
14	Peralatan Anafilaktik	2025	32		100%	21.000.000	APBD	2026	32		100%	23.100.000	APBD
15	Formula Terapi Gizi Buruk	2025	149.905		100%	952.476.000	APBD	2026	164.895		100%	857.225.000	APBD
16	Tenaga medis : Dokter	2025	32		100%	-	APBD	2026	32		100%	-	APBD
17	Tenaga kesehatan : Bidan	2025	32		100%	-	APBD	2026	32		100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Tenaga kesehatan : Perawat	2025	32		100%	-	APBD	2026	32		100%	-	APBD
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2025	32		100%	-	APBD	2026	32		100%	-	APBD
20	Guru PAUD	2025	43		100%	-	APBD	2026	43		100%	-	APBD
21	Kader Kesehatan	2025	2.343		100%	-	APBD	2026	3		100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
5)	Pelayanan Kesehatan Pendidikan Dasar	2025	94.449		100%		APBD	2026	103.894	103.894	100%		APBD
1	Form pencatatan/Buku raport kesehatanku	2025	94.449		100%	4.359.570.000	APBD	2026	103.894	103.894	100%	4.450.170.900	APBD
2	Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan	2025	94.449		100%	4.359.570.000	APBD	2026	103.894	103.894	100%	4.450.170.900	APBD
3	Kuesioner skrining kesehatan	2025	94.449		100%	130.787.100	APBD	2026	103.894	103.894	100%	145.249.830	APBD
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	2025	94.449		100%	130.787.100	APBD	2026	103.894	103.894	100%	145.249.830	APBD
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	2025	94.449		100%	12,750,000	APBD	2026	103.894	103.894	100%	15,790,000	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	2025	4.597.528		100%	1.011.456.160	APBD	2026	4.827.404	4.827.404	100%	1.168.231.865	APBD
7	Alat Pemeriksaan Hb	2025	94.449		100%	0	APBD	2026	103.894	103.894	100%		APBD
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	2025	94.449		100%	673,074,800	APBD	2026	103.894	103.894	100%	688,406,800	APBD
9	Media promosi kesehatan	2025	32		100%	8.450.000	APBD	2026	32	32	100%	9.295.000	APBD
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	2025	Anak usia sekolah dasar (kls 1=29526, kls 2=29436, kls 5=29466, kls 6 P=14369)		100%	1.922.303.900	APBD	2026	Anak usia sekolah dasar (kls 1=32479, kls 2=32380, kls 5=32413, kls 6 P=15806)	Anak usia sekolah dasar (kls 1=32479, kls 2=32380, kls 5=32413, kls 6 P=15806)	100%	2,114,558,600	APBD
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
12	Tenaga kesehatan : Bidan	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
13	Tenaga kesehatan : Perawat	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
6)	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	2025	911.298		100%		APBD	2026	1.002.428	1.002.428	100%		APBD
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	2025	32		100%	3.500.000	APBD	2026	32	32	100%	5.250.000	APBD
2	Alat : Alat ukur berat badan	2025	32		100%	15.200.000	APBD	2026	32	32	100%	16.720.000	APBD
3	Alat : Alat ukur tinggi badan	2025	32		100%	48.320.000	APBD	2026	32	32	100%	53.152.000	APBD
4	Alat : Alat ukur lingkar perut	2025	32		100%	1.120.000	APBD	2026	32	32	100%	1.232.000	APBD
5	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	2025	32		100%	3.502.656	APBD	2026	32	32	100%	3.852.928	APBD
6	Alat : Tensimeter	2025	32		100%	36.800.000	APBD	2026	32	32	100%	40.480.000	APBD
7	Alat : Glukometer	2025	32		100%	33.579.424	APBD	2026	32	32	100%	36.937.376	APBD
8	Alat: Alat Pemeriksa Hb	2025	911.298		100%	157.500.000	APBD	2026	1.002.428	1.002.428	100%	173.250.000	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Alat : Tes strip gula darah	2025	911.298		100%	2.278.250.000	APBD	2026	1.002.428	1.002.428	100%	2.756.600.000	APBD
10	Alat : Lancet	2025	911.298		100%	544.000	APBD	2026	1.002.428	1.002.428	100%	598.400	APBD
11	Alat : Kapas alkohol	2025	911.298		100%	2.642.770.000	APBD	2026	1.002.428	1.002.428	100%	3.197.751.700	APBD
12	Alat : KIT IVA Tes	2025	32		100%	3.057.912.000	APBD	2026	32	32	100%	3.700.096.400	APBD
13	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	2025	911.298		100%	1.011.487.500	APBD	2026	1.002.428	1.002.428	100%	1.224.052.500	APBD
14	Kit Ophthalmologi Komunitas	2025	32		100%	20.800.000	APBD	2026	1.002.428	1.002.428	100%	22.880.000	APBD
15	Kuesioner PUMA (Deteksi dini PPOK)	2025	911.298		100%	182.259.600	APBD	2026	1.002.428	1.002.428	100%	220.533.940	APBD
16	Alat Pelayanan KB	2025	911.298		100%	706.825.600	APBD	2026	1.002.428		100%	777.508.160	APBD
a	Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	2025	911.298		100%	464.000.000	APBD	2026	1.002.428		100%	510.400.000	APBD
b	Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	2025	911.298		100%	311.514.848	APBD	2026	1.002.428		100%	822.004.320	APBD
c	Vasectomi Set	2025	911.298		100%	615.936.000	APBD	2026	1.002.428		100%	677.529.600	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2025	911.298		100%	182.300.000	APBD	2026	1.002.428		100%	200.485.400	APBD
18	Vaksin Tetanus Difteri (td)	2025	Ibu hamil (31219)		100%	708.730.000	APBD	2026	Ibu hamil (31223)		100%	780.019.900	APBD
19	Tenaga medis : Dokter	2025	32		100%	-	APBD	2026	1.002.428		100%	-	APBD
20	Tenaga kesehatan : Bidan	2025	32		100%	-	APBD	2026	1.002.428		100%	-	APBD
21	Tenaga kesehatan : Perawat	2025	32		100%	-	APBD	2026	1.002.428		100%	-	APBD
22	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2025	32		100%	-	APBD	2026	1.002.428		100%	-	APBD
23	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2025	32		100%	-	APBD	2026	1.002.428		100%	-	APBD
24	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	2025	87		100%	-	APBD	2026	1.002.428		100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
7)	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	2025	206.872		100%		APBD	2026	227.559	233.781	100%		APBD
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	2025	212.528		100%	646.400.000	APBD	2026	233.781	233.781	100%	1.066.560.000	APBD
2	Glukometer (alat pemeriksaan gula darah)	2025	212.528		100%	33.579.424	APBD	2026	233.781	233.781	100%	73.874.752	APBD
3	Alat pemeriksaan kolesterol	2025	212.528		100%	11.850.880	APBD	2026	233.781	233.781	100%	26.071.936	APBD
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	2025	212.528		100%	4.117.942.528	APBD	2026	233.781	233.781	100%	9.018.335.856	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Instrumen skrining lansia sederhana (SKILAS), instrumen aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS/Activity daily living (ADL Barthel)	2025	212.528		100%	42.505.600	APBD	2026	233.781	233.781	100%	46.800.000	APBD
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	2025	212.528		100%	4.250.560.000	APBD	2026	233.781	233.781	100%	4.675.620.000	APBD
7	Media KIE	2025	212.528		100%	1.600.000	APBD	2026	233.781	233.781	100%	1.760.000	APBD
8	Tenaga medis : Dokter	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
9	Tenaga kesehatan : Bidan	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
10	Tenaga kesehatan : Perawat	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2025	105,450		100%		APBD	2026	115.995	115.995	100%		APBD
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2025	105.450		100%	1.600.000	APBD	2026	32	32	100%	4.800.000	APBD
2	Obat Hipertensi	2025	105.450		100%	68.542.500	APBD	2026	115.995	115.995	100%	75.396.750	APBD
3	Tensimeter	2025	105.450		100%	36.800.000	APBD	2026	32	32	100%	40.480.000	APBD
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	2025	105.450		100%	10.550.000	APBD	2026	32	32	100%	11.599.500	APBD
5	Media promosi kesehatan	2025	105.450		100%	3.500.000	APBD	2026	32	32	100%	4.800.000	APBD
6	Tenaga medis : Dokter	2025	32		100%		APBD	2026	32	32	100%		APBD
7	Tenaga kesehatan : Bidan	2025	32		100%		APBD	2026	32	32	100%		APBD
8	Tenaga kesehatan : Perawat	2025	32		100%		APBD	2026	32	32	100%		APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2025	32		100%		APBD	2026	32	32	100%		APBD
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	2025	32		100%		APBD	2026	32	32	100%		APBD
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2025	32		100%		APBD	2026	32	32	100%		APBD
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2025	32		100%		APBD	2026	32	32	100%		APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2025	8.227		100%		APBD	2026	9.049	9.049	100%		APBD
1	Obat Diabetes Melitus	2025	8.227		100%	76.511.100	APBD	2026	9.049	9.049	100%	84.165.000	APBD
2	Fotometer atau Glukometer	2025	8.227		100%	12.432.000	APBD	2026	32	32	100%	24.864.000	APBD
3	Reagen Glukosa atau Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	2025	12.341		100%	39.489.600	APBD	2026	9.049	9.049	100%	43.440.000	APBD
4	Formulir pencatatan dan pelaporan, aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), ASIK, SIMPUS	2025	32		100%	822.700	APBD	2026	32	32	100%	900.000	APBD
5	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2025	32		100%	3.200.000	APBD	2026	32	32	100%	6.400.000	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Sarana dan Prasarana	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
7	Tenaga medis : Dokter	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
8	Tenaga kesehatan : Bidan	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
9	Tenaga kesehatan : Perawat	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
13	Tenaga kesehatan : Teknis Medis (ATLM)	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
10)	Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ	2025	2.935		100%		APBD	2026	3.232	3.229	100%		APBD
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	2025	32 PKM + 3 RSUD		100%	3.200.000	APBD	2026	3,223	3,223	100%	5.250.000	APBD
2	Penyediaan Psikofarmaka	2025	11 jenis x 32 pkm =288		100%	332.858.350	APBD	2026	3,223	3,223	100%	366.144.185	APBD
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	2025	3 aplikasi x 32 pkm =96		100%	9.600.000	APBD	2026	3,223	3,223	100%	9.600.000	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	2025	3 x 32 pkm =96		100%	14.400.000	APBD	2026	3,223	3,223	100%	14.400.000	APBD
5	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2025	3 x 2396 =7188		100%	4.800.000	APBD	2026	3,223	3,223	100%	4.800.000	APBD
6	Tenaga kesehatan : Dokter	2025	RSUD SPKJ 3 orang Puskesmas dr Pengelola Program Keswa 20 orang		100%	32	APBD	2026	23	23	100%	-	APBD
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	2025	Psikologis kilinis 1 org Perawat Pengelola Prog Keswa 11 Orang Bidan Pengelola Program Keswa 1 Orang		100%	32	APBD	2026	13	13	100%	-	APBD
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	2025	9 orang Kader Khusus Jiwa baru di Puskesmas Cipatat		100%	32	APBD	2026	9	9	100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
11)	Pelayanan Kesehatan Penderita Tuberkolosis	2025	19.116		100%		APBD		19.116	19.116	100%		APBD
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	2025	32		100%	1.600.000	APBD	2026	32	32	100%	4.800.000	APBD
2	Reagen Zn TB	2025	5		100%	16.896.000	APBD	2026	4	4	100%	18.585.600	APBD
3	Masker bedah dan Masker N95	2025	19.116		100%	25.424.280	APBD	2026	19.116	19.116	100%	225.424.280	APBD
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	2025	121		100%	781.741.107	APBD	2026	105	105	100%	678.363.735	APBD
5	Katrid tes cepat molekuler	2025	28		100%	142.080.000	APBD	2026	24	24	100%	121.782.840	APBD
6	Formulir pencatataFormulir pencatatan dan pelaporann dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2025	100		100%	8.700.000	APBD	2026	100	100	100%	9.600.000	APBD
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	2025	100		100%	-	APBD	2026	100	100	100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
8	Tuberkulin	2025	574		100%	1.524.005.000	APBD	2026	496	496	100%	1.676.395.000	APBD
9	Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	2025	100		100%	-	APBD	2026	100	100	100%	-	APBD
10	Tenaga kesehatan : Perawat	2025	100		100%	-	APBD	2026	100	100	100%	-	APBD
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2025	100		100%	-	APBD	2026	100	100	100%	-	APBD
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2025	100		100%	-	APBD	2026	100	100	100%	-	APBD
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	2025	100		100%	-	APBD	2026	100	100	100%	-	APBD
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	2025	10		100%	-	APBD	2026	10	10	100%	-	APBD
15	Kader Kesehatan	2025	64		100%	-	APBD	2026	64	64	100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	2025	36.408		100%		APBD		36.408	36.408	100%		APBD
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	2025	32		100%	3.500.000	APBD	2026	32	32	100%	3.500.000	APBD
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	2025	36.408		100%	36.750.000	APBD	2026	36.408	36.408	100%	36.750.000	APBD
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	2025	36.408		100%	88.743.778	APBD	2026	36.408	36.408	100%	88.743.778	APBD
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	2025	36.408		100%	3.500.000	APBD	2026	36.408	36.408	100%	3.500.000	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+1 (2025)						Pencapaian SPM N+1 (2026)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
6	Tenaga kesehatan : Bidan	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
7	Tenaga kesehatan : Perawat	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	2025	32		100%	-	APBD	2026	32	32	100%	-	APBD

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH SPM URUSAN KESEHATAN
TAHUN 2027-2028

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2027)						Pencapaian SPM N+3 (2028)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
1)	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		45.859		100%	115.158.300	APBD		50.445		100%		APBD
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	2027	45.859	-	100%	81.629.020	APBD	2028	50.445	-	100%	1.005.024.790	APBD
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	2027	8.254.620	-	100%	1.816.016.400	APBD	2028	9.080.100	-	100%	1.997.622.000	Provinsi
				-				2028		-			
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	2027	45.859	-	100%	1.491.563.975	APBD	2028	50.445	-	100%	1.640.723.625	APBD
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	2027	45.859	-	100%	1.021.538.000	APBD	2028	50.445	-	100%	1.124.026.000	APBD
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	2027	45.859	-	100%	156.423.000	APBD	2028	50.445	-	100%	171.385.200	APBD
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	2027	6.879	-	100%	34.400.000	APBD	2028	7.567	-	100%	37.850.000	APBD
				-				2028		-			
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Hepatitis B	2027	6.879	-	100%	828.000	APBD	2028	50.445	-	100%	906.000	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2027)							Pencapaian SPM N+3 (2028)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Sifilis	2027	6.879	-	100%	75.625.000	APBD	2028	50.445	-	100%	83.325.000	APBD
9	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : HIV	2027	6.879	-	100%	275.160.000	APBD	2028	50.445	-	100%	302.680.000	APBD
10	Kartu ibu/rekam medis ibu	2027	45.859	-	100%	36.720.000	APBD	2028	50.445	-	100%	40.400.000	APBD
11	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2027	45.859	-	100%	1.476.659.800	APBD	2028	50.445	-	100%	1.624.329.000	APBD
12	Media KIE	2027	140	-	100%	7.000.000	APBD	2028	32	-	100%	8.750.000	APBD
13	Gel USG	2027	45.859	-	100%	199.032.400	APBD	2028	32	-	100%	218.931.300	APBD
14	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	32	APBD
15	Tenaga kesehatan : Perawat	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	32	APBD
16	Tenaga kesehatan : Bidan	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	32	APBD
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	32	APBD
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	32	APBD
19	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	2027	39,851	-	100%	-	APBD	2028	43,836	-	100%	43,836	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2027)							Pencapaian SPM N+3 (2028)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		43.547				APBD		47.902				APBD
1	Formulir partograf	2027	43.547	-	100%	30.482.900	APBD	2028	47.902	-	100%	30.545.900	APBD
2	Kartu ibu (rekam medis)	2027	43.547	-	100%	34.480.000	APBD	2028	47.902	-	100%	34.880.000	APBD
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2027	43.547	-	100%	653.205.000	APBD	2028	47.902	-	100%	654.555.000	APBD
4	Media KIE	2027	32	-	100%	1.600.000	APBD	2028	32	-	100%	1.600.000	APBD
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
6	Tenaga kesehatan : Bidan	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
7	Tenaga kesehatan : Perawat	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2027)							Pencapaian SPM N+3 (2028)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		50.183						55.201			937.388.562	
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	2027	Bayi 0-7 hari (31487)	-	100%	921.939.360	APBD	2028	Bayi 0-7 hari (31535)	-	100%	923.344.900	APBD
2	Vitamin K1 injeksi	2027	31 487	-	100%	120.248.853	APBD	2028	31.535	-	100%	120.432.165	APBD
3	Salep/tetes mata antibiotik	2027	31 487	-	100%	314.870.00	APBD	2028	31.535	-	100%	315.535.000	APBD
4	Formulir bayi baru lahir	2027	31 487	-	100%	708.457.500	APBD	2028	31.535	-	100%	709.537.500	APBD
5	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2027	31 487	-	100%	-	APBD	2028	31.535	-	100%	-	APBD
6	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	2027	32	-	100%	1.600.000	APBD	2028	32	-	100%	1.600.000	APBD
7	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
8	Tenaga kesehatan : Bidan	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
9	Tenaga kesehatan : Perawat	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
13	Kader Kesehatan	2027	3	-	100%	-	APBD	2028	3	-	100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2027)						Pencapaian SPM N+3 (2028)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
4)	Pelayanan Kesehatan Balita		181.385						199.524				
1	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	2027	181.385	-	100%	90.700.000	APBD	2028	199.524	-	100%	99.800.000	APBD
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	2027	181.385	-	100%	65.340.000	APBD	2028	199.524	-	100%	72.000.000	APBD
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	2027	181.385	-	100%	-	APBD	2028	199.524	-	100%	-	APBD
4	Vitamin A Biru	2027	117.126	-	100%	423.750.000	APBD	2028	128.015	-	100%	466.125.000	APBD
5	Vitamin A Merah	2027	296.031	-	100%	5.693.550.000	APBD	2028	323.555	-	100%	6.262.905.000	APBD
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	2027	Bayi 1-11 bulan (77235)	-	100%	409.036.560	APBD	2028	Bayi 1-11 bulan (84959)	-	100%	143.299.168	APBD
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	2027	Bayi 1-11 bulan (77235)	-	100%	230.855.415	APBD	2028	Bayi 1-11 bulan (84959)	-	100%	88.966.704	APBD
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	2027	Bayi 1-11 bulan (77235)	-	100%	3.280.402.155	APBD	2028	Bayi 1-11 bulan (84959)	-	100%	1.264.176.818	APBD
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	2027	Bayi 1-11 bulan (77235)	-	100%	1.579.146.810	APBD	2028	Bayi 1-11 bulan (84959)	-	100%	673.473.620	APBD
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	2027	Bayi 1-11 bulan (77235)	-	100%	1.747.596.345	APBD	2028	Bayi 1-11 bulan (84959)	-	100%	610.022.610	APBD
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	2027	Bayi 1-11 bulan (77235)	-	100%	1.747.596.345	APBD	2028	Bayi 1-11 bulan (84959)	-	100%	673.473.620	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2027)						Pencapaian SPM N+3 (2028)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak – Rubella	2027	Bayi 1-11 bulan (114744)	-	100%	2.351.793.024	APBD	2028	Bayi 1-11 bulan (126218)	-	100%	610.022.610	APBD
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	2027	181.385	-	100%	804.486.370	APBD	2028	199.524	-	100%	979.822.305	APBD
14	Peralatan Anafilaktik	2027	32	-	100%	23.232.000	APBD	2028	32	-	100%	27.951.000	APBD
15	Formula Terapi Gizi Buruk	2027	181.385	-	100%	771.511.000	APBD	2028	199.524	-	100%	694.365.000	APBD
16	Tenaga medis : Dokter	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
17	Tenaga kesehatan : Bidan	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
18	Tenaga kesehatan : Perawat	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
20	Guru PAUD	2027	43	-	100%	-	APBD	2028	43	-	100%	-	APBD
21	Kader Kesehatan	2027	3	-	100%	-	APBD	2028	3	-	100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2027)						Pencapaian SPM N+3 (2028)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
5)	Pelayanan Kesehatan Pendidikan Dasar		114.283						125.712				
1	Form pencatatan/Buku raport kesehatanku	2027	322.777	-	100%	1.315.320.350	APBD	2028	355.055	-	100%	3.222.133.200	APBD
2	Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan	2027	322.777	-	100%	1.315.320.350	APBD	2028	355.055	-	100%	3.222.133.200	APBD
3	Kuesioner skrining kesehatan	2027	322.777	-	100%	175.913.465	APBD	2028	355.055	-	100%	213.033.000	APBD
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	2027	322.777	-	100%	175.913.465	APBD	2028	355.055	-	100%	213.033.000	APBD
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	2027	322.777	-	100%	175.913.465	APBD	2028	355.055	-	100%	213.033.000	APBD
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	2027	5.310.144	-	100%	1.345.236.693	APBD	2028	5.287.157	-	100%	1.549.137.001	APBD
7	Alat Pemeriksaan Hb	2027	322.777	-	100%	190.575.000	APBD	2028	355.055	-	100%	209.632.500	APBD
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	2027	322.777	-	100%	520.905.000	APBD	2028	355.055	-	100%	630.022.195	APBD
9	Media promosi kesehatan	2027	32	-	100%	60.500	APBD	2028	32	-	100%	11.246.950	APBD
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	2027	Murid SD Kelas 1=35727, kls 2=35618, kls 5=35654, kls 6 P=17387)	-	100%	1.993.345.200	APBD	2028	Murid SD Kelas 1=29298, kls 2=29402, kls 5=29466, kls 6 P=14292	-	100%	2.033.213.600	APBD
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
12	Tenaga kesehatan : Bidan	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2027)						Pencapaian SPM N+3 (2028)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
13	Tenaga kesehatan : Perawat	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2027)							Pencapaian SPM N+3 (2028)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
6)	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		1.102.671						1.212.938				
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	2027	32	-	100%	1.600.000	APBD	2028	32	-	100%	1.600.000	APBD
2	Alat : Alat ukur berat badan	2027	32	-	100%	18.392.000	APBD	2028	32	-	100%	20.231.200	APBD
3	Alat : Alat ukur tinggi badan	2027	32	-	100%	58.467.200	APBD	2028	32	-	100%	64.313.200	APBD
4	Alat : Alat ukur lingkar perut	2027	32	-	100%	1.355.200	APBD	2028	32	-	100%	1.490.720	APBD
5	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	2027	32	-	100%	4.238.208	APBD	2028	32	-	100%	4.662.048	APBD
6	Alat : Tensimeter	2027	32	-	100%	44.528.000	APBD	2028	32	-	100%	48.980.800	APBD
7	Alat : Glukometer	2027	32	-	100%	40.631.104	APBD	2028	32	-	100%	44.694.240	APBD
8	Alat: Alat Pemeriksa Hb	2027	1.075.087	-	100%	190.575.000	APBD	2028	1.075.087	-	100%	209.632.500	APBD
9	Alat : Tes strip gula darah	2027	1.075.087	-	100%	3.577.365.000	APBD	2028	1.075.087	-	100%	4.328.744.750	APBD
10	Alat : Lancet	2027	1.075.087	-	100%	658.240	APBD	2028	1.075.087	-	100%	724.064	APBD
11	Alat : Kapas alkohol	2027	1.075.087	-	100%	4.150.059.210	APBD	2028	1.075.087	-	100%	5.021.189.514	APBD
12	Alat : KIT IVA Tes	2027	32	-	100%	4.475.712.400	APBD	2028	32	-	100%	5.415.639.680	APBD
13	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	2027	1.075.087	-	100%	1.443.832.500	APBD	2028	1.075.087	-	100%	1.747.037.325	APBD
14	Kit Ophthalmologi Komunitas	2027	1.075.087	-	100%	25.168.000	APBD	2028	1.075.087	-	100%	27.684.800	APBD
15	Kuesioner PUMA (Deteksi dini PPOK)	2027	1.075.087	-	100%	286.188.232	APBD	2028	1.075.087	-	100%	346.287.601	APBD
16	Alat Pelayanan KB	2027	1.075.087	-	100%	855.258.976	APBD	2028	1.075.087	-	100%	940.784.864	APBD
a	Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	2027	1.075.087	-	100%	561.440.000	APBD	2028	1.075.087	-	100%	617.584.000	APBD
b	Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	2027	1.075.087	-	100%	904.204.736	APBD	2028	1.075.087	-	100%	994.625.216	APBD
c	Vasectomi Set	2027	1.075.087	-	100%	745.282.560	APBD	2028	1.075.087	-	100%	819.810.816	APBD
17	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2027	1.075.087	-	100%	236.519.200	APBD	2028	1.075.087	-	100%	260.171.000	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2027)							Pencapaian SPM N+3 (2028)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
18	Vaksin Tetanus Difteri (td)	2027	Bumil (15610)	-	100%	321.269.410	APBD	2028	Bumil (15610)		Bumil (15610)	321.269.420	APBD
19	Tenaga medis : Dokter	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
20	Tenaga kesehatan : Bidan	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
21	Tenaga kesehatan : Perawat	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
22	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
23	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
24	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	2027	87	-	100%	-	APBD	2028	87	-	100%	-	APBD
7)	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		227.559						250.315				
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	2027	32	-	100%	391.072.000	APBD	2028	32	-	100%	391.072.000	APBD
2	Glukometer (alat pemeriksaan gula darah)	2027	32	-	100%	40.631.104	APBD	2028	32	-	100%	40.631.104	APBD
3	Alat pemeriksaan kolesterol	2027	32	-	100%	143.395.552	APBD	2028	32	-	100%	143.395.552	APBD
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	2027	128	-	100%	1.240.064	APBD	2028	128	-	100%	1.240.064	APBD
5	Instrumen skrining lansia sederhana (SKILAS), instrumen aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS/Activity daily living (ADL Barthel)	2027	128	-	100%	12.800.000	APBD	2028	128	-	100%	12.800.000	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2027)							Pencapaian SPM N+3 (2028)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	2027	227.559	-	100%	1.137.795.000	APBD	2028	250.315	-	100%	1.251.575.000	APBD
7	Media KIE	2027	32	-	100%	1.600.000	APBD	2028	32	-	100%	1.600.000	APBD
8	Tenaga medis : Dokter	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
9	Tenaga kesehatan : Bidan	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
10	Tenaga kesehatan : Perawat	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2027)						Pencapaian SPM N+3 (2028)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		250.315						275.347				
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2027	32	-	100%	1.600.000	APBD	2028	32	-	100%	1.600.000	APBD
2	Obat Hipertensi	2027	250.315	-	100%	1.627.047.500	APBD	2028	275.347	-	100%	1.789.755.500	APBD
3	Tensimeter	2027	32	-	100%	44.528.000	APBD	2028	32	-	100%	44.528.000	APBD
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	2027	32	-	100%	1.600.000	APBD	2028	32	-	100%	1.600.000	APBD
5	Media promosi kesehatan	2027	32	-	100%	1.600.000	APBD	2028	32	-	100%	1.600.000	APBD
6	Tenaga medis : Dokter	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
7	Tenaga kesehatan : Bidan	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
8	Tenaga kesehatan : Perawat	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2027)							Pencapaian SPM N+3 (2028)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		9.954					2.028	10.949				
1	Obat Diabetes Melitus	2027	9.954	-	100%	154.287.00	APBD	2028	10.949	-	100%	169.709.500	APBD
2	Fotometer atau Glukometer	2027	32	-	100%	12.432.000	APBD	2028	32	-	100%	12.432.000	APBD
3	Reagen Glukosa atau Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	2027	9.954	-	100%	47.760.000	APBD	2028	10.949	-	100%	52.440.000	APBD
4	Formulir pencatatan dan pelaporan, aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), ASIK, SIMPUS	2027	32	-	100%	19.200.000	APBD	2028	32	-	100%	19.200.000	APBD
5	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2027	32	-	100%	1.600.000	APBD	2028	32	-	100%	1.600.000	APBD
6	Sarana dan Prasarana	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
7	Tenaga medis : Dokter	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
8	Tenaga kesehatan : Bidan	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
9	Tenaga kesehatan : Perawat	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2027)							Pencapaian SPM N+3 (2028)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
13	Tenaga kesehatan : Teknis Medis (ATLM)	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
10)	Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ		3.552						3.907				
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	2027	32 PKM	-	100%	6.400.000	APBD	2028	32 PKM	-	100%	6.400.000	APBD
2	Penyediaan Psikofarmaka	2027	11 jenis obat psikofarmaka x32 pkm=352	-	100%	402.420.288	APBD	2028	11 jenis obat psikofarmaka x32 pkm=352	-	100%	402.420.288	APBD
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	2027	96	-	100%	9.600.000	APBD	2028	96	-	100%	9.600.000	APBD
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	2027	96	-	100%	14.400.000	APBD	2028	96	-	100%	14.400.000	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2027)							Pencapaian SPM N+3 (2028)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2027	32	-	100%	1.600.000	APBD	2028	32	-	100%	1.600.000	APBD
6	Tenaga kesehatan : Dokter	2027	RSUD SPKJ 3 orang Puskesmas dr Pengelola Program Keswa 20 orang	-	100%	-	APBD	2028	RSUD SPKJ 3 orang Puskesmas dr Pengelola Program Keswa 20 orang	-	100%	-	APBD
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	2027	Psikologis kilinis 1 org Perawat Pengelola Prog Keswa 11 Orang Bidan Pengelola Program Keswa 1 Orang	-	100%	-	APBD	2028	Psikologis kilinis 1 org Perawat Pengelola Prog Keswa 11 Orang Bidan Pengelola Program Keswa 1 Orang	-	100%	-	APBD
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	2027	9 orang Kader Khusus Jiwa baru di Puskesmas Cipatat	-	100%	-	APBD	2028	9 orang Kader Khusus Jiwa baru di Puskesmas Cipatat	-	100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2027)							Pencapaian SPM N+3 (2028)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
11)	Pelayanan Kesehatan Penderita Tuberkolosis		21.028						23.130				
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	2027	100	-	100%	5.000.000	APBD	2028	100	-	100%	5.000.000	APBD
2	Reagen Zn TB	2027	4	-	100%	2.555.520	APBD	2028	3	-	100%	1.914.000	APBD
3	Masker bedah dan Masker N95	2027	3.840	-	100%	1.369.344.000	APBD	2028	5	-	100%	1.369.344.000	APBD
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	2027	93	-	100%	11.127.171	APBD	2028	84	-	100%	10.050.348	APBD
5	Katrid tes cepat molekuler	2027	22	-	100%	4.226.068	APBD	2028	19	-	100%	3.649.786	APBD
6	Formulir pencatataFormulir pencatatan dan pelaporann dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2027	100	-	100%	10.000.000	APBD	2028	100	-	100%	10.000.000	APBD
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	2027	100	-	100%	5.000.000	APBD	2028	100	-	100%	5.000.000	APBD
8	Tuberkulin	2027	440	-	100%	15.400.000	APBD	2028	398	-	100%	13.930.000	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2027)							Pencapaian SPM N+3 (2028)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	2027	100	-	100%	-	APBD	2028	100	-	100%	-	APBD
10	Tenaga kesehatan : Perawat	2027	100	-	100%	-	APBD	2028	100	-	100%	-	APBD
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2027	100	-	100%	-	APBD	2028	100	-	100%	-	APBD
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2027	100	-	100%	-	APBD	2028	100	-	100%	-	APBD
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	2027	100	-	100%	-	APBD	2028	100	-	100%	-	APBD
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	2027	10	-	100%	-	APBD	2028	10	-	100%	-	APBD
15	Kader Kesehatan	2027	64	-	100%	-	APBD	2028	64	-	100%	-	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2027)							Pencapaian SPM N+3 (2028)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		40.049						44.054				
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	2027	32	-	100%	1.600.000	APBD	2028	32	-	100%	1.600.000	APBD
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	2027	32	-	100%	16.800.000	APBD	2028	32	-	100%	16.800.000	APBD
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	2027	384	-	100%	85.089.792	APBD	2028	384	-	100%	85.089.792	APBD
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	2027	384	-	100%	19.200.000	APBD	2028	384	-	100%	19.200.000	APBD
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
6	Tenaga kesehatan : Bidan	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
7	Tenaga kesehatan : Perawat	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	2027	32	-	100%	-	APBD	2028	32	-	100%	-	APBD

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH SPM URUSAN KESEHATAN
TAHUN 2029-2030

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+4 (2029)							Pencapaian SPM N+5 (2030)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
1)	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		55.490						61.039				
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	2029	55.490	-	100%		APBD	2030			100%		APBD
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	2029	9.988.200	-	100%		APBD	2030		-	100%		APBD
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	2029	55.490	-	100%		APBD	2030		-			APBD
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	2029	55.490	-	100%		APBD	2030		-	100%		APBD
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	2029	55.490	-	100%		APBD	2030		-	100%		APBD
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	2029	8.324	-	100%		APBD	2030		-	100%		APBD
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Hepatitis B	2029	55.490	-	100%		APBD	2030		-			APBD
8	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Sifilis	2029	55.490	-	100%		APBD	2030		-	100%		APBD
9	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : HIV	2029	55.490	-	100%		APBD	2030		-	100%		APBD
10	Kartu ibu/rekam medis ibu	2029	55.490	-	100%		APBD	2030		-	100%		APBD
11	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2029	55.490	-	100%		APBD	2030		-	100%		APBD
12	Media KIE	2029	32	-	100%		APBD	2030		-	100%		APBD
13	Gel USG	2029	32	-	100%		APBD	2030		-	100%		APBD
14	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	2029	32	-	100%		APBD	2030		-	100%		APBD
15	Tenaga kesehatan : Perawat	2029	32	-	100%		APBD	2030		-	100%		APBD
16	Tenaga kesehatan : Bidan	2029	32	-	100%		APBD	2030		-	100%		APBD
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2029	32	-	100%		APBD	2030		-	100%		APBD
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2029	32	-	100%		APBD	2030		-	100%		APBD
19	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	2029	53041	-	100%		APBD	2030		-	100%		APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+4 (2029)							Pencapaian SPM N+5 (2030)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		52.692						57.961				
1	Formulir partograph	2029	52.692	-	100%		APBD	2030	57.961	-	100%		APBD
2	Kartu ibu (rekam medis)	2029	52.692	-	100%		APBD	2030	57.961	-	100%		APBD
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2027	52.692	-	100%		APBD	2030	57.961	-	100%		APBD
4	Media KIE	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
6	Tenaga kesehatan : Bidan	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
7	Tenaga kesehatan : Perawat	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2027	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		60.721						66.793				
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	2029	Bayi 0-7 hari (29232)	-	100%		APBD	2030	Bayi 0-7 hari (29232)	-	100%		APBD
2	Vitamin K1 injeksi	2029	60.721	-	100%		APBD	2030	66.793	-	100%		APBD
3	Salep/tetes mata antibiotic	2027	60.721	-	100%		APBD	2030	66.793	-	100%		APBD
4	Formulir bayi baru lahir	2029	60.721	-	100%		APBD	2030	66.793	-	100%		APBD
5	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2029	60.721	-	100%		APBD	2030	66.793	-	100%		APBD
6	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
7	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
8	Tenaga kesehatan : Bidan	2027	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
9	Tenaga kesehatan : Perawat	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
13	Kader Kesehatan	2029	3	-	100%		APBD	2030	3	-	100%		APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+4 (2029)							Pencapaian SPM N+5 (2030)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
4)	Pelayanan Kesehatan Balita	2029	219.476						241.424				
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	2029	219.476	-	100%		APBD	2030	241.424	-	100%		APBD
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	2029	219.476	-	100%		APBD	2030	241.424	-	100%		APBD
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	2029	219.476	-	100%		APBD	2030	241.424	-	100%		APBD
4	Vitamin A Biru	2029	139.389	-	100%		APBD	2030	241.424	-	100%		APBD
5	Vitamin A Merah	2029	352.302	-	100%		APBD	2030	241.424	-	100%		APBD
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	2029	Bayi 1-11 bulan (93455)	-	100%		APBD	2030	Bayi 1-11 bulan (93455)	-	100%		APBD
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	2029	Bayi 1-11 bulan (93455)	-	100%		APBD	2030	Bayi 1-11 bulan (93455)	-	100%		APBD
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	2029	Bayi 1-11 bulan (93455)	-	100%		APBD	2030	Bayi 1-11 bulan (93455)	-	100%		APBD
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib	2029	Bayi 1-11 bulan (93455)	-	100%		APBD	2030	Bayi 1-11 bulan (93455)	-	100%		APBD
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	2029	Bayi 1-11 bulan (93455)	-	100%		APBD	2030	Bayi 1-11 bulan (93455)	-	100%		APBD
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	2029	Bayi 18-24 bln (93455)	-	100%		APBD	2030	Bayi 18-24 bln (93455)	-	100%		APBD
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	2029	Bayi 18-24 bln (138840)	-	100%		APBD	2030	Bayi 18-24 bln (138840)	-	100%		APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+4 (2029)							Pencapaian SPM N+5 (2030)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	2029	219.476	-	100%		APBD	2030	241.424	-	100%		APBD
14	Peralatan Anafilaktik	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
15	Formula Terapi Gizi Buruk	2029	219.476	-	100%		APBD	2030	241.424	-	100%		APBD
16	Tenaga medis : Dokter	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
17	Tenaga kesehatan : Bidan	2027	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
18	Tenaga kesehatan : Perawat	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
20	Guru PAUD	2029	43	-	100%		APBD	2030	43	-	100%		APBD
21	Kader Kesehatan	2029	3	-	100%		APBD	2030	3	-	100%		APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+4 (2029)							Pencapaian SPM N+5 (2030)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
5)	Pelayanan Kesehatan Pendidikan Dasar		138.283					2030	152.112				
1	Form pencatatan/Buku raport kesehatanku	2029	138.283	-	100%		APBD	2030	152.112	-	100%		APBD
2	Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan	2029	138.283	-	100%		APBD	2030	152.112	-	100%		APBD
3	Kuesioner skrining Kesehatan	2029	138.283	-	100%		APBD	2030	152.112	-	100%		APBD
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	2029	138.283	-	100%		APBD	2030	152.112	-	100%		APBD
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	2029	138.283	-	100%		APBD	2030	152.112	-	100%		APBD
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	2029	5.517.034	-	100%		APBD	2030	6.068.737	-	100%		APBD
7	Alat Pemeriksaan Hb	2029	138.283	-	100%		APBD	2030	152.112	-	100%		APBD
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	2029	138.283	-	100%		APBD	2030	152.112	-	100%		APBD
9	Media promosi kesehatan	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	2029	Anak Usia sekolah Dasar kls 1=29858, kls 2=29690, kls 5=29755, kls 6=14432	-	100%		APBD	2030	Anak Usia sekolah Dasar kls 1=32844, kls 2=32659, kls 5=32731 kls 6=1575	-	100%		APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+4 (2029)							Pencapaian SPM N+5 (2030)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
12	Tenaga kesehatan : Bidan	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
13	Tenaga kesehatan : Perawat	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	2027	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+4 (2029)						Pencapaian SPM N+5 (2030)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
6)	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	2029	1.334.232					2030	1.467.655				
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
2	Alat : Alat ukur berat badan	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
3	Alat : Alat ukur tinggi badan	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
4	Alat : Alat ukur lingkar perut	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
5	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
6	Alat : Tensimeter	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
7	Alat : Glukometer	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
8	Alat: Alat Pemeriksa Hb	2029	1.334.232	-	100%		APBD	2030	1.467.655	-	100%		APBD
9	Alat : Tes strip gula darah	2029	1.334.232	-	100%		APBD	2030	1.467.655	-	100%		APBD
10	Alat : Lancet	2029	1.334.232	-	100%		APBD	2030	1.467.655	-	100%		APBD
11	Alat : Kapas alkohol	2029	1.334.232	-	100%		APBD	2030	1.467.655	-	100%		APBD
12	Alat : KIT IVA Tes	2029	1.334.232	-	100%		APBD	2030	1.467.655	-	100%		APBD
13	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	2029	1.334.232	-	100%		APBD	2030	1.467.655	-	100%		APBD
14	Kit Ophthalmologi Komunitas	2029	1.334.232	-	100%		APBD	2030	1.467.655	-	100%		APBD
15	Kuesioner PUMA (Deteksi dini PPOK)	2029	1.334.232	-	100%		APBD	2030	1.467.655	-	100%		APBD
16	Alat Pelayanan KB	2029	1.334.232	-	100%		APBD	2030	1.467.655	-	100%		APBD
a	Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	2029	1.334.232	-	100%		APBD	2030	1.467.655	-	100%		APBD
b	Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	2029	1.334.232	-	100%		APBD	2030	1.467.655	-	100%		APBD
c	Vasectomi Set	2029	1.334.232	-	100%		APBD	2030	1.467.655	-	100%		APBD
17	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2029	1.334.232	-	100%		APBD	2030	1.467.655	-	100%		APBD
18	Vaksin Tetanus Difteri (td)	2029	Bumil (31843)	-	100%		APBD	2030	Bumil (31843)	-	100%		APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2029)							Pencapaian SPM N+3 (2030)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
19	Tenaga medis : Dokter	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
20	Tenaga kesehatan : Bidan	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
21	Tenaga kesehatan : Perawat	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
22	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
23	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
24	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	2029	87	-	100%		APBD	2030	87	-	100%		APBD
7)	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		253.347						278.681				
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
2	Glukometer (alat pemeriksaan gula darah)	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
3	Alat pemeriksaan kolesterol	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	2029	253.347	-	100%		APBD	2030	278.681	-	100%		APBD
5	Instrumen skrining lansia sederhana (SKILAS), instrumen aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS/Activity daily living (ADL Barthel)	2029	253.347	-	100%		APBD	2030	278.681	-	100%		APBD
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	2029	253.347	-	100%		APBD	2030	278.681	-	100%		APBD
7	Media KIE	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2029)						Pencapaian SPM N+3 (2030)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Tenaga medis : Dokter	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
9	Tenaga kesehatan : Bidan	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
10	Tenaga kesehatan : Perawat	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2029)						Pencapaian SPM N+3 (2030)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		302.882						333.170				
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
2	Obat Hipertensi	2029	109	-	100%		APBD	2030	109	-	100%		APBD
3	Tensimeter	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
5	Media promosi kesehatan	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
6	Tenaga medis : Dokter	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
7	Tenaga kesehatan : Bidan	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
8	Tenaga kesehatan : Perawat	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		12.044						13.248				
1	Obat Diabetes Melitus	2029	12.044	-	100%		APBD	2030	13.248	-	100%		APBD
2	Fotometer atau Glukometer	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
3	Reagen Glukosa atau Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	2029	12.044	-	100%		APBD	2030	13.248	-	100%		APBD
4	Formulir pencatatan dan pelaporan, aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
5	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2029)						Pencapaian SPM N+3 (2030)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
6	Sarana dan Prasarana	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
7	Tenaga medis : Dokter	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
8	Tenaga kesehatan : Bidan	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
9	Tenaga kesehatan : Perawat	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD
13	Tenaga kesehatan : Teknis Medis (ATLM)	2029	32	-	100%		APBD	2030	32	-	100%		APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2029)							Pencapaian SPM N+3 (2030)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
10)	Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ	2029	4.298					2030	4.727				
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	2029	32 PKM	-	100%		APBD	2030	32 PKM	-	100%		APBD
2	Penyediaan Psikofarmaka	2029	11 jenis obat psikofarmaka x32 pkm=352	-	100%		APBD	2030	11 jenis obat psikofarmaka x32 pkm=352	-	100%		APBD
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	2029	96	-	100%		APBD	2030	96	-	100%		APBD
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	2029	96	-	100%		APBD	2030	96	-	100%		APBD
5	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2029	3 x 4298 = 12894	-	100%		APBD	2030	3 x 4298 = 12894	-	100%		APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2029)							Pencapaian SPM N+3 (2030)				
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Tenaga kesehatan : Dokter	2029	RSUD SPKJ 3 orang Puskesmas dr Pengelola Program Keswa 20 orang	-	100%		APBD	2030	RSUD SPKJ 3 orang Puskesmas dr Pengelola Program Keswa 20 orang	-	100%		APBD
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	2029	Psikologis kilinis 1 org Perawat Pengelola Prog Keswa 11 Orang Bidan Pengelola Program Keswa 1 Orang	-	100%		APBD	2030	Psikologis kilinis 1 org Perawat Pengelola Prog Keswa 11 Orang Bidan Pengelola Program Keswa 1 Orang	-	100%		APBD
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	2029	9 orang Kader Khusus Jiwa baru di Puskesmas Cipatat	-	100%		APBD	2030	9 orang Kader Khusus Jiwa baru di Puskesmas Cipatat	-	100%		APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2029)						Pencapaian SPM N+3 (2030)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11)	Pelayanan Kesehatan Penderita Tuberkolosis		25.443						27.987				
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	2029	100	-	100%		APBD	2030	100	-	100%		APBD
2	Reagen Zn TB	2029	3	-	100%		APBD	2030	3	-	100%		APBD
3	Masker bedah dan Masker N95	2029	5	-	100%		APBD	2030	5	-	100%		APBD
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	2029	77.200	-	100%		APBD	2030	77.200	-	100%		APBD
5	Katrid tes cepat molekuler	2029	17.900	-	100%		APBD	2030	17.900	-	100%		APBD
6	Formulir pencatataFormulir pencatatan dan pelaporann dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2029	100	-	100%		APBD	2030	100	-	100%		APBD
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	2029	100	-	100%		APBD	2030	100	-	100%		APBD
8	Tuberkulin	2029	378	-	100%		APBD	2030	378	-	100%		APBD
9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	2029	100	-	100%		APBD	2030	100	-	100%		APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2029)						Pencapaian SPM N+3 (2030)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
10	Tenaga kesehatan : Perawat	2029	100	-	100%		APBD	2030	100	-	100%		APBD
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	2029	100	-	100%		APBD	2030	100	-	100%		APBD
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2029		-	100%		APBD	2030		-	100%		APBD
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	2029	100	-	100%		APBD	2030	100	-	100%		APBD
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	2029	10	-	100%		APBD	2030	10	-	100%		APBD
15	Kader Kesehatan	2029	64	-	100%		APBD	2030	64	-	100%		APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM N+2 (2029)						Pencapaian SPM N+3 (2030)					
		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		48.459						53.305				
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	2029	48.459	-	100%		APBD	2030	53.305	-	100%		APBD
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	2029	48.459	-	100%		APBD	2030	53.305	-	100%		APBD
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	2029	48.459	-	100%		APBD	2030	53.305	-	100%		APBD
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	2029	48.459	-	100%		APBD	2030	53.305	-	100%		APBD
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	2029	42	-	100%		APBD	2030	42	-	100%		APBD
6	Tenaga kesehatan : Bidan	2029	42	-	100%		APBD	2030	42	-	100%		APBD
7	Tenaga kesehatan : Perawat	2029	42	-	100%		APBD	2030	42	-	100%		APBD
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	2029	42	-	100%		APBD	2030	42	-	100%		APBD
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	2029	42	-	100%		APBD	2030	42	-	100%		APBD
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	2029	16	-	100%		APBD	2030	16	-	100%		APBD

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM

TAHUN 2025-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2025)				Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM N+1 (2026)					
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
1)	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	2025	8.124	-	100%	11.618.843.250		2026	8.292	-		11.8593.3554.951	APBD
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	2025	2.031	-	100%	2.904.710.813	APBD	2026	2.073	-	100%	2.964.888.738	APBD
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	2025	2.031	-	100%	2.904.710.813	APBD	2026	2.073	-	100%	2.964.888.738	APBD
3	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	2025	6.093	-	100%	8.714.132.438	APBD	2026	6.219	-	100%	8.894.666.213	APBD
4	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	2025	6.093	-	100%	8.714.132.438	APBD	2026	6.219	-	100%	8.894.666.213	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2025)				Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM N+1 (2026)					
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
2)	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	2025	7.115		100%	3.557.563.200	APBD	2026	7.279	-	100%	3.639.387.154	APBD
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	2025	7.115	-	100%	3.557.563.200	APBD	2026	7.279	-	100%	3.639.387.154	APBD
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	2025	-	-	-	-	-	2026	-	-	-	-	-
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	2025	7.115	-	100%	3.557.563.200	APBD	2026	7.279	7.279	100%	3.639.387.154	APBD

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM
TAHUN 2027-2028

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM N+2 (2027)				Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM N+3 (2028)					
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari													
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	2027	8.464	-	100%	12.105.253.560	APBD	2028	8.640	-	100%	12.356.042.396	APBD
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	2027	2.116	-	100%	3.026.313.390	APBD	2028	2.160	-	100%	3.089.010.599	APBD
3	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	2027	2.116	-	100%	3.026.313.390	APBD	2028	2.160	-	100%	3.089.010.599	APBD
4	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	2027	6.348	-	100%	9.078.940.170	APBD	2028	6.480	-	100%	9.267.031.797	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM N+2 (2027)				Sumber Penda naan	Pencapaian SPM N+3 (2028)					
			Penerima Layanan Dasar	Realisa si	Mutu Layanan	Anggaran		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
2)	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	2027	7.446	-	100%	3.723.093.058	APBD	2028	7.617	-	100%	3.808.724.198,-	APBD
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	2027	7.446	-	100%	3.723.093.058	APBD	2028	7.617	-	100%	3.808.724.198,-	APBD
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	2027	-	-	-	-	-	2028	-	-	-	-	-
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	2027	7.446	-	100%	3.723.093.058	APBD	2028	7.617	-	100%	3.808.724.198,-	APBD

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM
TAHUN 2029 -2030

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM N+4 (2029)				Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM N+5 (2030)					
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
1)	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	2029	8.819		100%	12.612.026.912	APBD	2030	9.001		100%	12.873.314.751	APBD
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	2029	2.205	-	100%	3.153.006.728,-	APBD	2030	2.250	-	100%	3.218.328.688	APBD
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	2029	2.205	-	100%	3.153.006.728,-	APBD	2030	2.250	-	100%	3.218.328.688	APBD
3	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	2029	6.614	-	100%	9.459.020.184,-	APBD	2030	6.751	-	100%	9.654.986.063	APBD
4	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	2029	6.614	-	100%	9.459.020.184,-	APBD	2030	6.751	-	100%	9.654.986.063	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM N+4 (2029)				Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM N+5 (2030)					
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
2)	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	2029	7.793		100%	3.896.324.855	APBD	2030	7.972		100%	3.985.940.327	APBD
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	2029	7.793	-	100%	3.896.324.855,	APBD	2030	7.972	-	100%	3.985.940.327	APBD
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	2029	-	-	-	-	-	2030	-	-	-	-	-
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	2029	7.793	-	100%	3.896.324.855, -	APBD	2030	7.972	-	100%	3.985.940.327	APBD

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH SPM URUSAN TRANTIBUMLINMAS
TAHUN 2025-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM N (2025)				Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM N+1(2026)					
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)		32.100 orang		32.100 orang	4.939.654.649			29.100 orang		29.100 orang	4.037.146.400	
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	2025	1.866		1.866	3.329.178.649,-	APBD	2026	2.475		2.475	2.334.235.400,-	APBD
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	2025	21		21	69.071.000,-	APBD	2026	21		21	69.071.000,-	APBD
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	2025	4.348		4.348	1.457.055.000,-	APBD	2026	4.411		4.411	1.472.490.000,-	APBD
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	2025	1		1	7.350.000,-	APBD	2026	1		1	7.350.000,-	APBD
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	2025	32.100		32.100	45.000.000,-	APBD	2026	29.100		29.100	90.000.000	APBD
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	2025	32.100		32.100	32.000.000,-	APBD	2026	29.100		29.100	64.000.000	APBD

URUSAN : PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2025)				Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM N+1 (2026)					
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
1)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)												
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	2025	1.700.000	100%	100%	10.275.000.000	APBD	2026	1.700.000	100%	100%	11.302.500.000	APBD
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	2025	1.700.000	100%	100%	600.000.000	APBD	2026	1.700.000	100%	100%	660.000.000	APBD
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	2025	1.700.000	100%	100%	600.000.000	APBD	2026	1.700.000	100%	100%	660.000.000	APBD
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	2025	8.500	100%	100%	8.250.000.000	APBD	2026	9.075	100%	100%	9.075.000.000	APBD
2)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	2025	1650	100%	100%	825.000.000	APBD	2026	1.815	100%	100%	907.500.000	APBD
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana	2025	8.250	100%	100%	11.550.000.000	APBD	2026	9.075	100%	100%	11.705.000.000	APBD
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	2025	8.250	100%	100%	8.250.000.000	APBD	2026	9.075	100%	100%	9.075.000.000	APBD
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	2025	3300	100%	100%	3.300.000.000	APBD	2026	3.630	100%	100%	3.630.000.000	APBD
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2025	4916	100%	100%	Rp. 3.965.171.000	APBD	2026	5408	100%	100%	Rp. 5.064.648.000	APBD
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	2025	5 Laporan	100%	100%	Rp. 50.000.000	APBD	2026	5 Laporan	100%	100%	Rp. 55.000.000	APBD
3	Melakukan respon cepat darurat bencana	2025	4916	100%	100%	Rp. 2.226.948.000	APBD	2026	5408	100%	100%	Rp. 2.449.824.000	APBD
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	2025	5 Laporan	100%	100%	Rp. 50.000.000	APBD	2026	5 Laporan	100%	100%	Rp. 55.000.000	APBD
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	2025	1 Laporan	100%	100%	Rp. 10.000.000	APBD	2026	1 Laporan	100%	100%	Rp. 11.000.000	APBD

URUSAN : EVAKUASI PEMADAM KEBAKARAN

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pencapaian SPM (2025)				Pencapaian SPM N+1 (2026)					
				REALISASI	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan	Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
1)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	2025		100%	100%	4.740.000.000	APBD	2026	787.249 JIWA	100%	100%	5.050.000.000	APBD
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	2025	5 Laporan	100%	100%	100.000.000	APBD	2026	5 Laporan	100%	100%	125.000.000	APBD
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2025	17 SOP	100%	100%	1.000.000.000	APBD	2026	17 SOP	100%	100%	1.000.000.000	APBD
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran	2025	2 Unit FT 1 Pos	100%	100%	3.500.000.000	APBD	2026	2 Unit FT 1 Pos	100%	100%	3.750.000.000	APBD
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	2025	40 Orang	100%	100%	40.000.000	APBD	2026	40 Orang	100%	100%	50.000.000	APBD
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	2025	5 Laporan	100%	100%	50.000.000	APBD	2026	5 Laporan	100%	100%	62.500.000	APBD
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	2025	5 Laporan	100%	100%	50.000.000	APBD	2026	5 Laporan	100%	100%	62.500.000	APBD

URUSAN : PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2027-2028

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM N+2 (2027)				Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM N+3 (2028)					
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
2)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)												
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	2027	1.700.000	100%	100%	300.000.000	APBD	2028	1.700.000	100%	100%	300.000.000	APBD
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	2027	1.700.000	100%	100%	300.000.000	APBD	2028	1.700.000	100%	100%	300.000.000	APBD
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	2027	9.982	100%	100%	9.982.500.000	APBD	2028	10.980	100%	100%	10.980.750.000	APBD
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	2027	1.996	100%	100%	998.250.000	APBD	2028	2.195	100%	100%	1.098.075.000	APBD
3)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)												
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana	2027	9.982	100%	100%	998.250.000	APBD	2028	10.980	100%	100%	1.098.075.000	APBD
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	2027	3.993	100%	100%	3.993.000.000	APBD	2028	4.392	100%	100%	4.392.300.000	APBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)												
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2027	5 Laporan	100 %	100 %	Rp. 60.500.000	APBD	2028	5 Laporan	100 %	100 %	Rp. 66.550.000	APBD
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	2027	5449	100%	100%	Rp. 2.694.897.000	APBD	2028	5994	100%	100%	Rp. 2.715.282.000	APBD
3	Melakukan respon cepat darurat bencana	2027	5 Laporan	100 %	100 %	Rp. 60.500.000	APBD	2028	5 Laporan	100 %	100 %	Rp. 66.550.000	APBD
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	2027	1 Laporan	100 %	100 %	Rp. 12.100.000	APBD	2028	1 Laporan	100 %	100 %	Rp. 13.310.000	APBD
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	2027	5 Laporan	100 %	100 %	Rp. 60.500.000	APBD	2028	5 Laporan	100 %	100 %	Rp. 66.550.000	APBD

URUSAN : PEMADAM KEBAKARAN

TAHUN 2027-2028

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM N+2 (2027)				Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM N+3 (2028)					
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
4)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)												
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	2027	582.625 Jiwa	582.625 Jiwa	100%	5.000.000.000,-	APBD	2028	582.625 Jiwa	Berapa jiwa yang terkena korban kebakaran	100%	6.000.000.000	APBD
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2027	3 SOP	3 SOP	100%	0	APBD	2028	3 SOP	3 SOP	100%	0	APBD
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran	2027	1 Mobil	1 Mobil	100%	5.000.000.000,-	APBD	2028	1 Mobil	1 Mobil	100%	6.000.000.000	APBD
4	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	2027	161 Orang	161 Orang	100%	900.000.000,-	APBD	2028	161 Orang	161 Orang	100%	900.000.000	APBD
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	2027	1.837.096 Jiwa	582.625 Jiwa	100%	5.000.000.000,-	APBD	2028	1.837.096 Jiwa	582.625 Jiwa	100%	6.000.000.000	APBD
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	2027	1.837.096 Jiwa	582.625 Jiwa	100%	5.000.000.000,-	APBD	2028	1.837.096 Jiwa	582.625 Jiwa	100%	6.000.000.000	APBD

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH SPM URUSAN TRANTIBUMLINMAS
TAHUN 2029-2030

URUSAN : TRANTIBUMLINMAS

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM N+4(2029)				Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM N+5(2030)					
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)		29.400 orang		29.400 orang	4.494.632.200		2030	29.400 orang		29.400 orang	6.976.953.399	
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	2029	4.328		4.328	2.491.073.700	APBD	2030	4.334		4.334	4.886.266.549	APBD
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	2029	21		21	91.933.500	APBD	2030	21		21	101.126.850,-	APBD
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	2029	4.600		4.600	1.517.275.000,-	APBD	2030	4.600		4.600	1.517.275.000,-	APBD
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	2029	1		1	9.350.000,-	APBD	2030	1		1	10.285.000	APBD
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil		29.400		29.400	225.000.000	APBD		29.400		29.400	270.000.000	APBD
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	2029	29.400		29.400	160.000.000	APBD		29.400		29.400	192.000.000	APBD

URUSAN : PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2029-2030

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM N+4 (2029)				Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM N+5 (2030)					
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran		Tahun Dasar	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
2)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	2029						2030					
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	2029	1.700.000	100%	100%	300.000.000	APBD	2030	1.700.000	100%	100%	300.000.000	APBD
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	2029	1.700.000	100%	100%	300.000.000	APBD	2030	1.700.000	100%	100%	300.000.000	APBD
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	2029	12.079	100%	100%	12.078.825.000	APBD	2030	13.286	100%	100%	13.286.707.500	APBD
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	2029	2.424	100%	100%	1.207.882.500	APBD	2030	2.666	100%	100%	1.328.670.750	APBD
3)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	2029						2030					
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana	2029	2.178	100%	100%	1.207.882.500	APBD	2030	2.395	100%	100%	1.328.670.750	APBD
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	2029	4.831	100%	100%	4.831.530.000	APBD	2030	5314	100%	100%	5.314.683.000	APBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	2029	7198	100%	100%	6.741.003.000	APBD	2030	7918	100%	100%	7.350.773.500	APBD
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2029	5 Laporan	100%	100%	73.205.000	APBD	2030	5 Laporan	100%	100%	80.525.500	APBD
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	2029	7198	100%	100%	3.260.694.000	APBD	2030	7918	100%	100%	3.586.763.400	APBD
3	Melakukan respon cepat darurat bencana	2029	5 Laporan	100%	100%	73.205.000	APBD	2030	5 Laporan	100%	100%	80.525.500	APBD
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	2029	1 Laporan	100%	100%	14.641.000	APBD	2030	1 Laporan	100%	100%	16.105.100	APBD
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	2029	7198	100%	100%	2.986.629.000	APBD	2030	7918	100%	100%	3.586.854.000	APBD

URUSAN: EVAKUASI KEBAKARAN
TAHUN 2029-2030

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM N+4 (2029)				Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM N+5 (2030)					
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran		Tahun Dasar	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
5)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	2029	787.249 JIWA	100%	100%	5.980.000.00	APBD	2030	787.249 JIWA	100%	100%	6.290.000.000	APBD
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	2029	5 Laporan	100%	100%	200.000.000-	APBD	2030	5 Laporan	100%	100%	225.000.000-	APBD
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2029	17 SOP	100%	100%	1.000.000.000	APBD	2030	17 SOP	100%	100%	1.000.000.000	APBD
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran	2029	2 Unit FT 1 Pos	100%	100%	4.500.000.000,-	APBD	2030	2 Unit FT 1 Pos	100%	100%	4.750.000.000,-	APBD
4	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	2029	40 Orang	100%	100%	80.000.000,-	APBD	2030	40 Orang	100%	100%	90.000.000,-	APBD
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	2029	5 Laporan	100%	100%	100.000.000	APBD	2030	5 Laporan	100%	100%	112.500.000	APBD
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	2029	5 Laporan	100%	100%	100.000.000	APBD	2030	5 Laporan	100%	100%	112.500.000	APBD

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH SPM URUSAN SOSIAL

TAHUN 2025-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2025)				Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM N (2026)				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KABUPATEN BANDUNG BARAT												
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	2025	612	612	100%	1,755,851,000	APBD	2026	680	680	100%	1.965.000.000
1	Layanan data dan pengaduan	2025	612	612	100%	30,447,200	APBD	2026	682	680	100%	35,000,000
2	Penyediaan permakanan	2025	150	150	100%	156,469,000		2026	165	165	100%	170,000,000
3	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	2025	75	75	100%	690,464,800		2026	80	80	100%	750,000,000
4	Penyediaan sandang	2025	150	150	100%	159,589,000		2026	165	165	100%	175,000,000
5	Penyediaan alat bantu	2025	50	50	100%	72,450,000		2026	55	55	100%	80,000,000
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	2025			0%			2026	0	0	0%	
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	2025	180	180	100%	193,747,800		2026	200	200	100%	220,000,000
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	2025	50	50	100%	189,050,400		2026	55	55	100%	210,000,000

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2025)				Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM N (2026)				
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran		Tahun Dasar	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	2025	20	20	100%	16,800,000		2026	25	25	100%	20,000,000
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	2025	22	22	100%	28,541,600		2026	25	25	100%	30,000,000
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	2025			100%			2026	25	25	100%	30,000,000
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2025	10	10	100%	29,520,000		2026	15	15	100%	35,000,000
13	Layanan rujukan	2025	55	55	100%	188,771,200		2026	60	60	100%	210,000,000
2)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat Paska Bencana Bagi Korban Bencana	2025	750	750	100%	2.247.000.000	APBD	2026	825	825	100%	2.471.700.000
1	Penyediaan permakanan	2025	750	750	100%	2.247.000.000,-	APBD	2026	825	825	100%	2.471.700.000
2	Penyediaan sandang	2025	750	750	100%		APBD	2026	825	825	100%	
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	2025	185	185	100%		APBD	2026	204	204	100%	
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	2025	250	250	100%		APBD	2026	275	275	100%	
5	Pelayanan dukungan Psikososial	2025	250	250	100%		APBD	2026	275	275	100%	

URUSAN : SOSIAL
TAHUN 2027-2028

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM N+2 (2027)				Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM N+3 (2028)					
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	2027	765	765	100%	2.111.500.000	APBD	2028	845		845	2.351.500.000	APBD
1	Layanan data dan pengaduan	2027	765	765	100%	40,000,000	APBD	2028	32	845	100%	45,000,000	APBD
2	Penyediaan permakanan	2027	180	180	100%	185,000,000		2028	200	200	100%	200,000,000	
3	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	2027	85	85	100%	825,000,000		2028	90	90	100%	900,000,000	
4	Penyediaan sandang	2027	180	180	100%	190,000,000		2028	200	200	100%	210,000,000	
5	Penyediaan alat bantu	2027	62	62	100%	85,000,000		2028	70	70	100%	95,000,000	
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	2027	0	0	0%			2028	0	0	0%		
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	2027	220	220	100%	240,000,000		2028	245	245	100%	265,000,000	
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	2027	65	65	100%	230,000,000		2028	70	70	100%	250,000,000	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM N+2 (2027)				Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM N+3 (2028)					
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran		Tahun Dasar	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan/bukti kepemilikan NIK	2027	30	30	100%	24,000,000		2028	35	35	100%	27,000,000	9
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	2027	30	30	100%	35,000,000		2028	35	35	100%	38,500,000	10
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga	2027	28	28	100%	32,500,000		2028	30	30	100%	36,000,000	11
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2027	28	28	100%	40,000,000		2028	30	30	100%	45,000,000	12
13	Layanan rujukan	2027	65	65	100%	220,000,000		2028	70	70	100%	240,000,000	13
2)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana	2027	908	908	100%	2.718.000.000,-	APBD	2028	999	999	100%	3.388.550.000,-	
1	Penyediaan permakanan	2027	908	908	100%	2.718.000.000,-	APBD	2028	999	999	100%		
2	Penyediaan sandang	2027	908	908	100%		APBD	2028	999	999	100%		
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	2027	225	225	100%		APBD	2028	248	248	100%		
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	2027	303	303	100%		APBD	2028	334	334	100%		
5	Pelayanan dukungan Psikososial	2027	303	303	100%		APBD	2028	334	334	100%		

URUSAN : SOSIAL
TAHUN 2029-2030

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM N+4 (2029)				Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM N+5 (2030)					
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran		Tahun Dasar	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN BANDUNG BARAT													
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	2029	940	940	100%	2.590.000.000	APBD	2030	1058	1058	100%	2.775.110.000	APBD
1	Layanan data dan pengaduan	2029	940	940	100%	50,000,000	APBD	2030	1058	1058	100%	55,000,000	APBD
2	Penyediaan permakanan	2029	220	220	100%	220,000,000		2030	250	250	100%	250,000,000	
3	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	2029	100	100	100%	990,000,000		2030	110	110	100%	1,080,000,000	
4	Penyediaan sandang	2029	220	220	100%	235,000,000		2030	250	250	100%	270,000,000	
5	Penyediaan alat bantu	2029	80	80	100%	100,000,000		2030	90	90	100%	110,000.00	
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	2029	0	0	0%			2030	0	0	0%		
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	2029	265	265	100%	290,000,000		2030	300	300	100%	330,000,000	
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	2029	80	80	100%	275,000,000		2030	90	90	100%	305,000,000	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM N+4 (2029)				Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM N+5 (2030)					
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran		Tahun Dasar	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan/bukti kepemilikan NIK	2029	40	40	100%	30,000,000	APBD	2030	45	45	100%	35,000,000	APBD
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	2029	40	40	100%	45,000,000	APBD	2030	45	45	100%	50,000,000	APBD
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga	2029	35	35	100%	40,000,000	APBD	2030	40	40	100%	45,000,000	APBD
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2029	35	35	100%	50,000,000	APBD	2030	40	40	100%	55,000,000	APBD
13	Layanan rujukan	2029	80	80	100%	265,000,000	APBD	2030	88	88	100%	300,000,000	APBD
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana	2029	1.099	1.099	100%	3.289.832.700	APBD	2030	1.209	1.209	100%	3.618.815.970	APBD
1	Penyediaan permakanan	2029	1.099	1.099	100%	3.289.832.700,-	APBD	2030	1.209	1.209	100%	3.618.815.970	APBD
2	Penyediaan sandang	2029	1.009	1.009	100%		APBD	2030	1.209	1.209	100%		
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	2029	273	273	100%		APBD	2030	1.209	1.209	100%		
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	2029	368	368	100%		APBD	2030	301	301	100%		
5	Pelayanan dukungan Psikososial	2029	368	368	100%		APBD	2030	405	405	100%		

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan Pelayanan Dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di Daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan Program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan Program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola Program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Apabila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan Program dan Kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana Program dan Kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa Kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan Kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian perkembangan hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung

jawab pelaksanaan Program dan Kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.

5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab Kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan Kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/compliance, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan/auditing, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan/accounting, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/explanation, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari Kegiatan atau Program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan Program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah Program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap (*output*). Evaluasi baru dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode, sesuai dengan tahapan Penerapan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Bandung Barat, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak.

Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan Program dan Kegiatan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. Kebijakan Daerah.
Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 - 1) Apa saja kebijakan Daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 - 2) Apakah kebijakan Daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat
 - 3) adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?

a. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar.

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek sumber daya manusia antara lain:

- a) Berapa jumlah sumber daya manusia pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
- b) Bagaimana kualifikasi sumber daya manusia pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum?, berapa banyak jumlah sumber daya manusia pada masing-masing kategori tersebut?
- c) Bagaimana Daerah merespon permasalahan pada aspek sumber daya manusia untuk memastikan Pelayanan Dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai peraturan perundang-undangan?
- d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa sumber daya manusia yang akan dilibatkan?

c. Koordinasi.

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

- a) Apakah Tim Penerapan SPM telah terbentuk?
- b) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan Perangkat Daerah pelaksana Pelayanan Dasar SPM dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM?, apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah?, apa saja masalah utama yang timbul?, dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
- c) Jika ada kerja sama Daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi?, jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- d) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (Daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah ada masalah di level koordinasi?, jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- e) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar SPM di Daerah? Apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi?, jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

d. Pendanaan

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- a) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
- b) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? Apakah ada pengutamakan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- c) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara variabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atautakah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? Perangkat Daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- d) apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan SPM kepada warganya?

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Aksi Pelaporan Pelaksanaan Rencana Penerapan SPM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Bupati menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh Daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

BAB V PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan penerapan SPM.

Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan, sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun kedepan.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Daerah masih rendah yang diakibatkan Perangkat Daerah masih kurang memahami terkait Penerapan SPM Daerah terhadap pemenuhan Pelayanan Dasar yang dibutuhkan masyarakat.

5.2. SARAN

1. Perlu Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Untuk Pemahaman Terhadap Kewenangan Pemenuhan Pencapaian SPM Di Daerah
2. Perlu adanya penyesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran dalam memenuhi Penerapan Standar Pelayanan Minimal
3. Perlu adanya Kesepahaman antara Tim Penyusun SPM di Sekretariat dan Dinas-dinas Pengampu SPM dalam pengisian tahapan-tahapan penerapan SPM
4. Perlu Adanya Sinergitas Antar Tim Penerapan SPM Supaya Perencanaan Penerapan SPM Tersebut Tepat Sasaran
5. Perlu Penguatan Tim Penerapan SPM Daerah Berkaitan Dengan Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sebagaimana Yang Tercantum Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Serta Pemutakhirannya Yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Demikian rencana aksi Daerah Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

6. Perlu Adanya Dorongan Dan Kebijakan Dari Kepala Daerah Untuk Memprioritaskan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kepada Masyarakat Secara Langsung
7. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Demikian Rencana Aksi Daerah Penerapan Spm Ini Dibuat, Semoga Bermanfaat Untuk Percepatan Penerapan Dan Peningkatan Indeks Pencapaian SPM Di Daerah.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL